PERSPEKTIF PENGEMBANGAN AL-QARḌUL ḤASAN DALAM MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIFNYA

Oleh :

ABD. SU'UD
NIM. 04913099

TESIS

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2007

PERSPEKTIF PENGEMBANGAN AL-QARḌUL ḤASAN DALAM MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIFNYA

Oleh :

ABD. SU'UD
NIM. 04913099

Pembimbing:
Prof. Dr.H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2007

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 212/PS-MSI/Peng./IX/2007

TESIS berjudul : **PERSPEKTIF PENGEMBANGAN *AL-QORDUL HASAN* DALAM MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIFNYA**

Ditulis oleh : Abd. Suud

N. I. M. : 04913099

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Yogyakarta, 15 Nopember 2007
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Abd. Suud
Tempat/tgl.lahir : Bojonegoro, 3 Mei 1971
N. I. M. : 04913099
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PERSPEKTIF PENGEMBANGAN *AL-QORDUL HASAN* DALAM MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIFNYA**

Ketua/Sekretaris : Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag. (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS. (.....)

Penguji : Dr. H. Supardi, MM. (.....)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 Nopember 2007

Pukul : 10.00–11.00 WIB

Hasil / Nilai : **85.75/ A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 405/PS-MSI/ND/X1/2007

TESIS berjudul : **STUDY PENGEMBANGAN *AL-QORDUL HASAN* DALAM MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIFNYA**

Ditulis oleh : Abd. Suud

NIM : 04913099

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 Nopember 2007
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. & Fax. (0274) 523637
e-mail: info @ msi-uii.net

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : STUDI PENGEMBANGAN AL-QARḌUL ḤASAN DALAM MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIFNYA

Ditulis oleh : Abd. Su'ud

NIM : 04913099

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 2 November 2007
Pembimbing,

Prof. Dr.H.Amir Mu'allim, MIS

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	N a m a	Huruf Latin	N a m a
أ	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	sa	ś	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ż	z (dengan titik di atas)
ر	ra	r	-
ز	za	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap, contoh:

أحمد يه ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat, zakat* dan sebagainya. Contoh:

   جما عة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*, contoh:

   كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

D Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai, contoh:

   بينكم ditulis *bainakum,*

2. Fathah + wawu mati ditulis au, contoh:

   قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم ditulis *a'antum*

مؤ نث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah, contoh:

   ألقرأن ditulis *al-Qur'ān*

   ألقياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila didikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

السـماء ditulis *as-Samā*

الشمس ditulis *asy-Syams*

I Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, contoh:

   ذ وى الفروض ditulis *żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh;

   اهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*

   شيخ الإ سلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islām*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSPEKTIF PENGEMBANGAN AL-QARḌUL ḤASAN DALAM MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIFNYA

ABD. SU'UD
NIM. 04913099

ABTRAKSI

*Meskipun al-Qarḍul Ḥasan tidak memberikan keuntungan finansial kepada bank syari'ah karena ia masuk dalam kategori akad tabarru', yang secara prinsip tidak dapat dirubah menjadi akad tijārah atau akad komeresial, akan tetapi ia memiliki posisi yang strategis, dengan keunggulan kompetitifnya antara lain; pembiayaan tanpa jaminan, hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman, sistem dan prosedur pembiayaan sederhana, bila penerima pembiayaan terbukti tidak mampu mengembalikan pokok pinjaman maka gugurlah pinjamannya, karenanya ia menjadi diantara poin atau ciri pembeda antara bank syari'ah dengan bank konvensional, namun dalam aplikasinya ternyata ada 2 persoalan, **pertama**, tidak semua bank syari'ah mengelola sendiri al-Qarḍul Ḥasan semisal BMI dan BSM, **kedua** belum dikelola secara profesional, terbukti dengan prosentase NPL (kredit macet) mencapi 26 % melebihi ambang batas BI sebesar 5 % berdasarkan hasil penelitian di BNI syari'ah tahun 2005, dengan pengguna didominasi oleh golongan fakir-miskin khususnya untuk penguatan modal usaha, sehingga tujuan yang di embannya belum dapat tercapai.*

Oleh karena itu tulisan ini bermaksud mencari jalan keluar dengan mengkaji upaya kearah pengembangan keunggulan kompetitif al-Qarḍul Ḥasan untuk meningkatkan performa serta memaksimalkan manfaat al-Qarḍul Ḥasan kepada penerimanya, dengan harapan hasil studi ini secara akademik mudah-mudahan dapat diterima oleh para peneliti lainnya bagi pengembangan ilmu pengatahuan khususnya ilmu ekonomi syari'ah serta acuan bagi pengambil kebijakan. Selanjutnya dalam study dan analisa yang penulis lakukan bahwa untuk maksud dan tujuan diatas kiranya dapat dilakukan melalui 3 jalur (1). Memperluas pangsa pasar al-Qarḍul Ḥasan kepada 8 asnaf yang memungkinkan dengan terlebih dahulu melakukan reintepretasi kepada asnaf yang tersisa, mengingat sumber dana al-Qarḍul Ḥasan berasal dari ZIS yang berarti semua asnaf memiliki hak, (2). Memperluas varian manfaat al-Qarḍul Ḥasan hingga bantuannya menyentuh kepada kebutuhan psikologis penerimanya, (3). Menjadikan pengawasan sebagai bagian tak terpisahkan dari pelayanan al-Qarḍul Ḥasan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSPECTIVE OF AL-QARD{UL H{ASAN EXPANSION INCREASING THE COMPETITIVE EXCELLENCE

ABD SU'UD
NIM. 04913099

ABSTRACT

The fact that al-Qarḍul Ḥasan doesn't give any financial advantage to syari'at banks because of belong to tabarru' agreement, principally irreversible to commercial agreement or tijārah agreement, however it has a strategic position with its competitive excellence, inter alia: defrayal on trust, obliged to return capital loan only, simple defrayal procedure and system, when defrayal acceptor proven to be unable to return the capital loan hence its loan failed, therefore it becomes among distinguishing point or characteristic between conventional and syari'ah banks, but simply there are 2 ideas in its application, ***first****, not all of syari'ah banks manage the al-Qarḍul Ḥasan by themselves, for example BMI(Indoesian Mu'alat Baking) and BSM (Syari'ah Mandiri Banking).* ***second****, it hasn't been managed professionally, proven by NPL percentage (bad debt) reaching about 26% exceed BI's limit threshold equal to about 5% based on research in BNI Syariah in 2005, with it's client dominated by indigent group specifically to capital employed reinforcement, so that its performed direction have not been achieved.*

Therefore, this article intended to discover solutions by examining the efforts toward competitive excellence expansion of al-Qarḍul Ḥasan to performance increase and advantage maximizing of al-Qarḍul Ḥasan to its receivers, on the chance for the result of this study hopefully acceptable academically by the other researchers for the science expansion especially syariah economics and becomes references to all of policy maker. Hereinafter in study and analysis which writer performs that direction and objectives above presumably can be done through three lines. (1). By al-Qarḍul Ḥasan market share expansion to the eight of remaining asnaf, considering the source of al-Qarḍul Ḥasan fund provide by ZIS that means all of asnaf hold the rights. (2). By al-Qarḍul Ḥasan advantage variant expansion until the assist reach to psychological requirement of its receiver. (3). Makes the observation as the indivisible part of al-Qarḍul Ḥasan services.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بســـــم الله الر حــمن الر حــيم

ألحمد لله الذى علـم الإنـسـان مـا لم يعلـم، أشـهد أن لا إ لـه إلا الله وأ شـهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنـام، أللهـم صل وسلم علـى سيد نا محمد وعـلـى أله و أصحابه الى يـوم الختام .أما بعد

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWt yang telah memberikan ilmu-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, dan tesis ini tidak akan terwujud bila tiada ridha, dan hidayah-Nya. Karena izin-Nya pula, dengan seluruh kemampuan yang ada, tesis ini bisa diselesaikan dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Dalam penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, do'a dan restu dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta..
2. Bapak Drs. H. Fajar Hidayanto, MM, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., sebagai Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sekaligus Pembimbing yang dengan tulus dan sabar dalam pembimbingan tesis ini.

4. Bapak Drs. H. Asmuni MTh., MA., sebagai Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Segenap Guru Besar, Dosen dan Staf Akademik yang telah memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta konsentrasi Ekonomi Islam.
6. Para staf dan karyawan Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah banyak membantu dan melayani selama penyusunan tesis ini.
7. Bpk. Firdaus Furywardhana yang telah memberikan izin data-data dari penelitiannya, penulis ambil dan dijadikan acuan dalam membahas tesis ini
8. Ayah dan Ibunda tercinta nun jauh di sana yang dengan kasih sayang selalu mendorong dan memberikan do'a restu dalam setiap langkah dan gerak penulis.
9. Isteri terkasih, Siti Ma'sumah juga ananda tersayang, Taritsa mahya Maulida serta Akhunda Akhmad Naqvy yang selalu mendampingi dan menyertai serta mendukung dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Secara khusus diucapkan terima kasih kepada Kepala KUA Tegalrejo, Drs. Drs. Kaheruddin dan Bpk. Drs. H Yusron yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan menyelesaikan tesis ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

11. Semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penulisan tesis ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penulis memanjatkan do'a semoga semua amal kebaikan dari semua pihak yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala yang lebih baik, teriring do'a *jazākumullāh ahsanal jazā*, amin

Yogyakarta, 02 November 2007

Penulis,

ABD. SU'UD

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR i
HALAMAN SAMPUL DALAM ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN TIM PENGUJI iv
HALAMAN NOTA DINAS v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xv
BAB I **PENDAHULUAN** 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Telaah Pustaka 10
E. Kerangka Teori 12
F. Metode Penelitian 20
G. Sistematika 23
BAB II **LANDASAN TEORI** 26
A. Al-Qardul Hasan 26
1. Pengertian 26
2. Dasar Hukum 28
3. Rukun al-Qarḍ 32
4. Syarat al-Qard 32
5.Objek al-Qard 32
6.Waktu Pengembalian al-Qard 33
7. Sumber Dana al-Qard 36
8. Manfaat Al-Qarḍul Ḥasan 37
B. Modal Ventura 39

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Pengertian 39
2. Sejarah 42
3. Sumber Dana 43
4. Pola Pembiayaan Modal Ventura 44
5. Tahapan Pembiayaan 46
6. Bentuk-bentuk Pembiayaan Modal Ventura.....48
7. Cara-cara Divestasi 49

BAB III APLIKASI AL-QARḌUL ḤASAN DALAM SISTEM PERBANKAN SYARI'AH 51

A. Posisi Al-Qarḍul Ḥasan 51
B. Pengelola Dana Al-Qarḍul Ḥasan 53
C. Sumber Dana dan Penggunaannya 54
D. Penggunaan Al-Qarḍul Ḥasan Oleh Penerima 61
E. Prosedur Pembiayaan Al-Qarḍul Ḥasan 62
F. Kelancaran Pengembalian Al-Qarḍul Ḥasan 68

BAB IV ANALISA 74

A. Pengembangan Keunggulan Kompetitif Al-Qarḍul Ḥasan.....74
1. Analisa Perluasan Pangsa Pasar 92
2. Analisa Pengembangan Varian Manfaat Al-Qarḍul Ḥasan 98
3. Analisa Pel;aksanaan Pengawasan 102
B. Lembaga Pengelola Al-Qarḍul Ḥasan 106

BAB V PENUTUP 110

A. Kesimpulan 110
B. Saran-saran 112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Deputi Bank Indonesia, Siti Ch Fajrijah, dalam dialog publik 2007 tentang Perkembangan Ekonomi Syari'ah di Indonesia, di kampus UNAIR Surabaya tanggal 6 Januari 2007 yang lalu, mengemukakan bahwa di Indonesia sepanjang tahun 2006, perkembangan bank Syari'ah menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Pertumbuhan aset perbankan Syari'ah dari tahun ketahun (y-o-y) tercatat 25.2 %, menjadi 36,4 % per akhir November 2006.Selanjutnya beliau menambahkan, bahwa hingga akhir November 2006, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 43,3 % (y-o-y), sehingga mencapai Rp. 19.4 triliun, dimana dana sebesar itu di dominasi oleh kelompok dana investasi (Mudharabah) dalam bentuk deposito (55,1%) dan tabungan (28,8%). Sementara Pembiayaan Yang di Berikan (PYD) tumbuh 36,3 % dan mencapai Rp. Rp. 20,39 triliun, dengan porposi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) mencapai 105,4%.[1]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dibalik keberhasilkan sebagaimana di sampaikan oleh Deputi Gubernur BI diatas, ternyata bank Syari'ah masih menyisakan beberapa persoalan. Setidak-tidaknya ada 2 persoalan; *pertama* adalah banyaknya tudingan yang mengatakan bahwa bank Syari'ah hanya sekedar perbankan konvensional yang di tambahi label syari'ah. Tudingan ini muncul karena banyaknya praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip syari'ah yang dilakukan perbankan Syari'ah. *Kedua*;

[1] Dikutip dari *http://www. Jatim.go.id/news.php?id+10411* tanggal 24 Januari 2007

adalah bagaimana menonjolkan ciri khas perbankan Syari'ah, yakni bank yang secara langsung membangun sektor riil dengan prinsip keadilan.

Tudingan bahwa bank syari'ah adalah bank konvensional dengan label Islam diatas tidak semua benar akan tetapi juga bukan tanpa bukti, misalnya tentang pembiayaan untuk UMKM. Sebenarnya bank-bank Syari'ah sendiri telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pengembangan UMKM ini, sebagaimana dilaporkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bahwa sesuai dengan visi dan misinya, PT PNM hinga akhir 2001 telah menyalurkan dana Rp. 1.5 trilyun kepada berbagai lembaga keuangan syari'ah, akan tetapi dana tersebut hanya dapat diakses bila ada jaminan atau di berikan kepada jenis kegiatan UMKM yang memiliki koperasi, sehingga bagi yang tidak berkoperasi dan memiliki jaminan tetap saja tidak dapat mengaksesnya.[2]

Kalau demikian adanya, maka harapan atau sasaran untuk mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata akan tetap menjadi harapan yang masih jauh, dalam kaitan ini Dr.Umer Chapra menyatakan :

> " Kurangnya pembiayaan merupakan hambatan paling serius bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, orang miskin itu bukan karena tidak bersedia bekerja keras atau kurang trampil, sebenarnya mereka itu telah bekerja lebih keras dari pada orang-orang kaya, dan memiliki ketrampilan lebih banyak daripada yang dapat mereka gunakan. Persoalan utamanya adalah karena mereka tidak memiliki akses kepada sumber-sumber keuangan, sementara pekerjaan yang memberinya upah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, apalagi untuk menabung atau menanamkan modal, karena itulah pembiayaan untuk kewirausahaan harus dia anggap sebagai

[2] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah, lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cet. II (Jakarta: AlvaBeta, 2000), hal. 109 juga dapat di lihat pada *www.Suaramerdeka.com/Harian/0507/26*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

suatu hak yang berperan sangat penting untuk mencapai pemenuhan hak-hak manusia yang lain"[3]

Dalam persoalan kedua, berdasarkan data BI, hingga akhir tahun 2003 total pembiayaan bank syari'ah mencapai Rp. 3.86 triliun dengan porsi terbesar adalah Murabahah yang mencapai 70 % atau Rp. 2.70 triliun sementara pembiayaan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) hanya 16.5 5 atau Rp. 637 miliar. Data-data tersebut mengisaratkan bahwa bank-bank syari'ah hingga saat ini masih mengedepankan provit oriented, sementara ciri pokoknya sebagai bank yang bekerja dengan megedepankan prinsip keadilan bagi nasabahnya belum optimal[4]

Hal tersebut adalah tidak salah karena pencapaaian keuntungan yang setinggi-tingginya –*profit maximation*– adalah tujuan yang dicanangkan dan di usung oleh semua busines entity, maka bank-bank Syari'ah tentu juga di harapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya dalam satu sisi, sementara pada sisi yang lainnya bank Islam harus dapat menyelaraskan antara tujuan profit dengan aspek moralitas, maka berdasarkan pada asas diatas di tetapkan fungsi bank Islam yang meliputi:

1. Manajer investasi
2. Investor, bank Islam dapat menginvestasikan dana nasabah atau dana yang dimilikinya sendiri.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran
4. Pelaksana kegiatan sosial sebagai satu ciri yang melekat pada entitas keuangan Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[3] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Alih bahasa; Nurhadi Hasan, Cet. I (Surabaya : Risalah Budi, 1999), hal. 141

[4] M Fajar Martha "Saatnya Bank Syari'ah Garap Pasar Mengambang" dikutip dari *http//www.kompas.com/kompas-cetak/0308/07/Perbankan* diambil tanggal 3 Maret 2007

Fungsi ke empat itulah yang secara sigfikan membedakan bank Syari'ah dengan bank konvensional, bahkan para pemrakarsa bank Syari'ah menyerukan *" Do not call Islamic banking if do not touch the grass root"* yang mengandung arti bahwa bank Syari'ah harus memiliki komitmen untuk ikut serta mendorong masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik melalui mobilisasi dana-dana sosial (*zakat, infaq dan ṣadaqah*) serta mendidik masyarakat untuk mampu memenage dana secara benar.[5]

Untuk itulah maka bank Syari'ah memiliki satu produk layanan yang di sebut *al-Qarḍ*. Dalam literatur fiqh klasik *al-Qarḍ*. di kategorikan dalam akad at-Taṭowwu' atau Tabarru' atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial, yang masuk dalam kategori akad ini diantaranya *Rahn, Ḥiwalah, Kafalah, Waḍi'ah, Waqqf, Hadiah dll*, dan secara khusus karena sifat al-Qarḍ yang tidak memberikan keuntungan finansial, maka dalam aplikasi perbankan akad ini sering di sebut dengan *al-Qarḍul Ḥasan* yakni pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang di sepakati, kemudian jika peminjam mengalami kerugian yang bukan karena sebab kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman, oleh karenanya produk ini di terapkan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas serta bonafiditasnya, yang membutukan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek

---

[5] Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta : Djambatan dan Institut Banking Indonesia, 2002), hal. 24 - 26

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.[6]

Walaupun al-Qarḍul Ḥasan dengan ***spesifikasi atau keunggulan kompetitif*** seperti diatas, sudah melekat dalam entitas bank Syari'ah, namun produk ini tidak/belum banyak di kenal luas dalam masyarakat, bahkan belum dapat dapat berfungsi secara optimal sebagaimana laporan BI diatas, sementara produk akad tabarru' lainya dapat berkembang dengan sangat baik, Hal inilah yang hendak penulis kaji kaitannya dengan pengembangan al-Qarḍul Ḥasan untuk menjawab persoalan atau tantangan diatas. Ada beberapa alasan penting yang mendorong penulis mengkaji masalah ini:

Pertama, adanya hasil penelitian di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta yang menyatakan bahwa BNI Syari'ah dengan 12 Cabang Syari'ah mengalami tunggakan angsuran atau dapat di istilahkan dengan Non Performance Loan (*NPL*) pinjaman al-Qarḍul Ḥasan sebesar 21 % pada akhir tahun 2003, dan meningkat menjadi 25 % pada tahun 2004 serta mengalami penigkatan lagi pada akhir tahun 2005 sebesar 26 %. Angka tersebut jelas melebihi batas angka toleransi yang di tetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yakni sebesar 5 % untuk menilai kesehatan suatu bank.[7]

Fakta ini pada akhirnya dapat menggiring kita kepada asumsi bahwa ada kemungkinan ketidak mampuan peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman

---

[6] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengantar Umum*, Cet. I (Yogyakarta : Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999), hal. 131

[7] Firdaus Furywardhana, "Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman Qarḍul Ḥasan, Study Kasus BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta", Tesis Magister Studi Islam UII, 2006, hal. 4

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

itu diakibatkan oleh usahanya yang di biayai dari dana al-Qarḍul Ḥasan itu tidak berhasil, baik oleh karena lemahnya manajemen pengelolaan usaha oleh penerima pinjaman al-Qarḍul Ḥasan atau karena beralihnya dana pinjaman dari fungsi bantuan modal usaha kepada fungsi konsumtif karena buruknya karakter peminjam, tetapi boleh jadi sebab-sebab kegagalan itu juga bisa datang dari pihak bank syari'ah sendiri.

Selanjutnya kegagalan penggunaan dana al-Qarḍul Ḥasan khususnya untuk modal usaha diatas, dapat membawa implikasi penilaian bahwa misi sosial yang di emban oleh bank syari'ah untuk memberdayakan kaum dhu'afa belum terlaksana secara baik, dan secara khusus berarti masih banyak umat Islam yang masih tetap hidup dalam kategori miskin (ḍu'afa). Oleh karena itu kiranya perlu segera dicari terobosan atau jalan keluarnya, diantaranya adalah dengan meningkatkan keunggulan kompetitif al-Qarḍul Ḥasan sebagai produk sosial dari bank syariah. Hal ini terasa sangat mendesak, lebih-lebih jika kita menyadari bahwa saat ini perusahaan-perusahaan swasta termasuk di dalamnya bank-bank swasta konvensional sedang giat melakukan kegiatan-kegiatan sosial, lewat program *Corporate Social Responsibility* (CSR), mulai dari pemberian bea siswa, membangun sarana-sarana social, bantuan modal usaha dan lain-lain. Semua itu dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat sekitarnya semata.

Dari hasil penelitian diatas juga terlihat bahwa penggunaan dana al-Qarḍul Ḥasan baru menyentuh beberapa golongan saja yakni fakir, miskin dan sabilillah, sementara dana yang digunakan untuk pembiayaan jenis ini itu berasal

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dari dana ZIS yang secara normatif harus di distribusikan kepada delapan (8) kelompok (aṣnaf) sebagaimana ditegaskan Allah dalam QS at-Taubah (9):60

Kedua, ada hal yang menurut hemat penulis perlu di cermati, bahwa dari laporan keuangan dari bank-bank Syari'ah khususnya yang telah memiliki unit ZIS tersendiri, yang di terbitkan atau yang dapat kita baca dari mass media atau kita akses pada situs-situs internet, tidak nampak disana tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana al-Qardhul Hasan, sementara Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian (KDPP) laporan keuangan syari'ah point 178 menyatakan bahwa bank syari'ah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana al-Qarḍul Ḥasan sebagai komponen utama laporan keuangan.[8] Bahkan tampaknya sekarang ada tren untuk membedakan usaha yang profit dengan non profit dari bank syari'ah, *dimana untuk usaha non profit dibentuk dan dimasukkan kedalam lembaga Baitul Maal*, misalnya Baitul Muamalah (BMM) milik Bank Muamalah Indinesia serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) Bangun Sejahtera Mitra (BSM) Umat milik Bank Syari'ah Mandiri. Bahkan pada tanggal 16 Juni 2000 Baitul Maal Mu'amalat (BMM) memisahkan diri dari struktur Bank Muamalat Indonesia serta membangun kompetensi sebagai jembatan pemberdayaan usaha mikro di Indonesia[9]

Ketiga; Pada sisi lain ada model pembiayaan dengan pola kerjasama bagi hasil dan tidak ada jaminan atau yang lebih dikenal dengan Modal Ventura[10], secara

---

[8] Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari'ah*, Cet. I (Jakarta : DSAK, 2002) hal. 31

[9] Dikutip dari *http//www.Baitulmaal.net/modules* tanggal 24 Januari 2007

[10] Modal Ventura merupakan aktiva pembiayaan yang bersifat risk capital, kepada individu atau suatu perusahaan yang mempunai gagasan/perspektif dengan tanpa adanya jaminan. Dasarnya terutama adalah keyakinan atas kemampuan seseorang, potensi serta prospek

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

umum ada perbedaan prinsipil diantara al-Qarḍul Ḥasan dengan Modal Ventura, akan tetapi keduanya memiliki kesamaan, diantaranya dalam hal tidak adanya jaminan untuk suatu pinjaman serta resiko hilangnya pokok pinjaman jika penerima pinjaman gagal dalam usahanya, juga kesamaan tentang perhatiannya atas kelangsungan hidup usaha kecil (UMKM), sehingga menarik untuk memperbandingkannya berikut melihat kemungkinan untuk mengadopsi hal-hal yang baik dan relevan dari modal ventura untuk menutup kekurangan-kerungan yang ada pada al-Qarḍul Ḥasan, sehinga lewat al-Qarḍul Ḥasan bank-bank Syari'ah nantinya mampu membangun kehidupan ekonomi masyarakat yang dapat diukur dari rata-rata pendapatan riilnya (*real income per capita*), dengan demikian telah terdapat pula peningkatan tata nilai sosial khususnya dalam bermuamalah secara Islami. Bahkan menurut Ketua ICMI pusat, Muslimin Nasution, hendaknya para pelaku usaha kecil bermitra dengan lembaga Modal Ventura, sebab disamping memberikan bantuan modal ia juga memberikan pembinaan terhadap usaha kecil, sehingga usaha kecil dapat berkembang.[11]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas hal pokok yang akan penulis angkat untuk di teliti dan kemudian di carikan jawabnya adalah :

---

pengembangan usaha. Model Pembiayaan melalui Modal Ventura diyakini relatif lebih lunak, terutama jika di bandingkan dengan pembiayaan dari kredit perbankan, antara lain karena balas jasa yang harus diberikan oleh penerima modal ventura berdasarkan prinsip bagi hasil, bahkan jika perusahaan atau perorangan yang menerima bantuan Modal Vntura mengalami kegagalan perusahaan MV ikut menanggungnya. Pembahsan lebih lanjut akan penulis bahas dalam bab II

[11] Indriani " Usaha Kecil Butuh Lembaga Keuangan Modal Ventura" dikutip dari *http//www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/08/01/brk.20050901* diambil 7 Februari 2007

1. Bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif al-Qarḍul Ḥasan dengan tanpa meninggalkan cirinya sebagai akad tabarru' dilihat dari kacamata fiqh?
2. Bagaimanakah pengelolaan al-Qarḍul Ḥasan itu sebaiknya dilakukan tetap pada Bank Syari'ah sebagaimana dikehendaki KDPP ataukah lembaga selain bank syari'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk melihat peluang dan kemungkinan meningkatkan keunggulan kompetitif lebih lanjut dari produk al-Qarḍul Ḥasan dengan menganalisa faktor-faktor yang ada yang berkaitan dengan pelaksanaan atau aplikasi produk al-Qarḍul Ḥasan oleh bank Syari'ah, baik yang positif maupun negatif.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui lembaga yang paling sesuai untuk mengelola al-Qarḍul Ḥasan, baik katanya dengan produk al-Qarḍul Ḥasan itu sendiri atau dalam upaya lebih optimalnya manfaat
3 Hasil penelitian ini di harapkan mampu di jadikan bahan pemikiran dan pertimbangan dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan aplikasi produk al-Qarḍul Ḥasan
4 Penelitian ini di harapkan pula mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan ilmu ekonomi Islam
5 Secara akademis, adalah sebagai salah satusyarat untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam, pada Program Pasca Sarjana di Universitas Islam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Indonesia, yang sekaligus sebagai sarana dan wahana untuk mengembangkan serta mengaplikasikan ilmu.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang sejauh ini penulis lakukan, di dapatkan data bahwa buku-buku, jurnal-jurnal atau laporan-laporan ilmiyah yang membahas secara khusus tentang usaha pengembangan keunggulan kompetitif al-Qarḍul Ḥasan dari bank Syari'ah menjadi satu produk yang lebih kompetitif dengan tidak meninggalkan fungsi sosialnya belum penulis ketemukan. Sebetulnya ada banyak buku yang membicarakan al-Qarḍul Ḥasan, bahkan dapat dikatakan hamper setiap buku yang berbicara tentang bank syari'ah tentu membicarakan al-Qarḍul Ḥasan, baik dalam bahasa Indonesia, Arab atau Inggris. Dalam bahasa Indoesia semisal buku ; Ekonomi Islam Suatu Kajian kontemporer karangan Adiwarman Karim, Buku Sistem Perbankan Islam, karangan Ahmad Muslehuddin, buku Manajemen Dana Bank Syari'ah, karangan Muhammad, buku Bank syari'ah Wacana Ulama dan Cendekia serta buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, karangan Muhammad Syafi'i Antonio, buku Sistem dan Operasional Bank Syari'ah karangan Muhammad, dalam bahasa Inggris misalnya buku Critical Issues Islamic Banking and Financial Markets, karangan Saiful Azhar Rosly, Islamic Banking, Fiqh and Financial Analysis, karangan Adiwarman Karim, dan masih banyak yang lainnya, namun dalam pandangan penulis, pembahasan buku-buku diatas tentang al-Qarḍul Ḥasan masih bersifat normatif, yakni hanya berkisar tentang pengertian, dasar

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

hokum, syarat dan rukun al-Qarḍ serta bentuk aplikasinya dalam perbankan syari'ah.

Kemudian dari laporan ilmiyah penulis temukan pembahansan yang menarik tentang al-Qarḍul Ḥasan, yakni Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman al-Qarḍul Ḥasan, Study Kasus BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, sebuah tesis Magister Study Islam dari Firdaus Furywardhana. Meskipun tidak secara langsung membahas tentang pengembangan al-Qarḍul Ḥasan namun ia dapat menjadi pintu masuk untuk keperluan dimaksud, karena tesis diatas memotret hal-hal penting yaitu:

1. Paradiqma masyarakat yang masih menilai bahwa al-Qarḍul Ḥasan merupakan produk sosial yang bersifat bantuan, sehingga pinjaman/pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan tidak wajib di kembalikan sebagaimana bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Paradigma ini sedikit ataupun banyak membawa konsekwensi atau pengaruh atas keberhasilan usaha yang dibiayai dari al-Qarḍul Ḥasan.
2. Adanya rekomendasi bahwa pola pelatihan dan pendampingan untuk mengubah pola kehidupan penerima al-Qarḍul Ḥasan, dalam mengelola pinjamannya jauh lebih penting disamping pemberian modal.

Berangkat dari temuan-temuan diatas, penulis ingin melanjutkannya dengan mengkaji adanya kemungkinan mengembangankan keunggulan kompetitif al-Qarḍul Ḥasan agar menjadi produk yang lebih kompetitif, dalam arti *tersedia dana yang cukup, prosedur pembiayaan yang ringan, dikelola secara proporsioal baik oleh bank syari'ah atau oleh penerima pinjaman,*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

serta berdaya guna maksimal terhadap peningkatan kesejehteraan penerimanya,

E. Kerangka Teoritik

Kalau disepakati bahwa Islam adalah ajaran dunia dan akhirat, maka sebagian tuntutannya adalah bahwa Islam harus mampu memberi jalan keluar dari problem pemeluknya, utamanya masalah kemiskinan dan kebodohan. Secara makro jalan keluar dari problem-problem tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Qodri Azizy adalah dengan memfokuskan pembahasan problem-problem tersebut diatas pada sasaran dan catatan tentang apa yang harus dikerjakan, kemudian mengarah kepada satu tujuan besarnya, yaitu perbaikan ekonomi umat, terutama sekali dengan pendekatan Islam[12] Dalam sistem ekonomi Islam yang holistik, maka tugas/fungsi dari sistem ekonomi Islam adalah :

1. Memerangi Kebodohan

   Islam mengajarkan bahwa orang yang bodoh yaitu orang yang tidak berakal, sedangkan orang yang tidak berakal adalah orang yang tidak memfungsikan akalnya secara baik, yaitu orang-orang yang menyembah, beribadah, takut, bekerja dll selain kepada Allah SWT

2. Memerangi Kemiskinan

   Islam mengajarkan bahwa orang kaya yang sebenarnya adalah apabila sebagian besar dari kekayaan atau rizqi yang di peroleh seseorang dan

[12] A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Cet. I (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004) Hal. 9

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sekaligus merupakan titipan dari Allah tersebut telah di berikan kepada 8 asnaf yang berhak

3. Memerangi kesakitan

Disamping merawat dan mengobati orang yang benar-benar sakit secara jasmaniah, namun orang yang benar-benar sakit dan sulit untuk di sembuhkan, yang hendak di perangi oleh Islam adalah orang-orang yang telah tertutup mata, hati, telinga dan kalbunya

4. Memerangi Kebatilan

Islam telah menunjukkan jalan yang lurus dan benar, akan tetapi banyak orang yang terperangkap dalam kebatilan guna memenuhi kebutuhannya seperti memiliki harta sebanyak mungkin ataupun untuk mencari kedudukan setinggi mungkin dengan menghalalkan segala cara[13])

Masalah ekonomi, dalam sistem ajaran Islam termasuk dalam kategori bidang Mu'āmalah, dimana dalam bidang ini syari'at Islam hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang bersifat umum dan mendasar, hal-hal yang rinci, detail dan teknis tidak diatur, tetapi di serahkan kepada manusia melalui proses ijtihad, Sehingga bidang mu'amalah dapat dikatakan sebagai *special tretment* bagi orang Islam karena adanya apa yang dinamakan الثوابت والمتغيرات *(prinsip dan variabel)*. Dalam sektor ekonomi maka **prinsip** yang dimaksud adalah berupa larangan riba, prinsip jual beli, prinsip pengambilan keuntungan, prinsip pengenaan zakat dan lain-lain, sementara

[13]) H. Suroso Imam Zadjuli, Evaluasi dan Potensi Pengembangan Ekonomi Syari'ah di Indonesia, *Makalah* disampaikan pada Seminar Evaluasi Ekonomi Syar'ah 2005 dan Outlook 2006, diselenggarakan oleh Centre of Islamics and Business Resourcess Development, Universitas Airlangga, Surabaya, 19 Desember 2005, hal. 10-11

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

variable merupakan instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip diatas, seperti skim muḍārabah, musyārakah, murābaḥah, al-Qarḍul Ḥasan dan lain-lain.[14]

Secara umum sesugguhnya ajaran Islam pada hakekatnya mengajak kepada kemajuan, prestasi dan kompetisi sehat untuk mengejar kesejahteraan di dunia dan akhirat, sehingga miskin, terbelakang, bodoh dan semacamnya tidak dikehendaki oleh Islam. Ayat yang sering dijadikan dalil untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi adalah QS al-Qaṣaṣ (28): 77

وابتغ فيما اتك الله دار الأخرة ولا تنس نصيبك من الد نيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض إنّ الله لا يحب المفسد ين

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duiawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesugguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"[15]

Ayat ini memiliki kandungan yang dalam, diantaranya:

1. Masalah keduniaan, bahwa berusaha menjadi kaya memiliki bobot yang besar dalam ajaran Islam, bukan sekedar suplemen.
2. Disamping pelajaran keseimbangan dunia dan akhirat, terdapat pula muatan etika agar di dalam memperoleh harta itu tetap menjaga perbuatan

---

[14] M. Syafi'I Antonio, "Bisnis dan Perbankan dalam perspektif Islam" dalam *Bank Syari'ah, Analisis Kekuatan, Kelemahan dan Kekuatan,* Muhammad, (ed), Cet II (Yogyakarta : Ekonosia, 2003), hal. 14

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : Thaha Putra, 1995) hal. 622

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

baik atau menjaga hak-hak asasi orang lain: tidak serakah, tidak zalim, tidak merugikan orang lain dan yang sejenisnya.

3. Bahwa Allah tidak saja melarang berbuat tidak baik kepada perorangan, tetapi juga melarang untuk membuat kerusakan di bumi[16]

Selanjutnya hubungan ekonomi berdasarkan syari'ah secara garis besar di tentukan oleh hubungan akad, dan berdasarkan akad-akad itulah kemudian muncul produk-produk bank syari'ah. Berdasarkan ada atau tidak adanya imbalan, fiqh mu'amalat membedakan dua jenis akad, pertama Akad Tabarru' (*non profit transaction)*, produk yang masuk dalam akad ini adalah, ***Qarḍ***, yang menjadi objek pembahasan saat ini, Wadī'ah, Wakālah, Kafālah, Rahn, Hibah dan Waqaf. kedua adalah Akad Tijarah *(Profit transaction*), dari kategori ini dapat di ambil dua jalur, pertama berdasarkan prinsip jual beli, bentuk produknya adalah Murābaḥah, Salam, Istiṣna dll. kedua berdasarkan prinsip kerjasama , masuk di dalamnya Musyārakah, Muzāroah, Musaqah dan Mukhābaroh.

Akad tabarru' lazimnya dilakukan orang semata-mata adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah, sehingga sebagaimana dikatakan oleh Adiwarman Karim, akad tabarru' tidak dapat dirubah atau digunakan untuk tujuan-tujuan komersial, sehingga jika bank syari'ah ingin mendapatkan keuntungan maka hendaknya ia bekerja diwilayah akad tijarah. Secara umum akad Tabarru' memiliki cirri-ciri sebagai berikut :

1. Non Profit Transaction
2. Tujuan transaksi adalah tolong menolong dan bukan keuntungan komersil

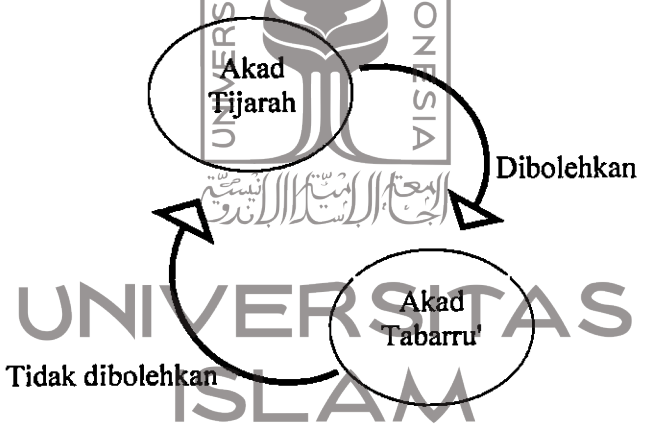
---

[16] A. Qodri Azizy,. *Membangun Fondasi*.....hal. 25

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Pihak yang berbuat kebaikan boleh meminta kepada counter partnya untuk menutup sekedar biaya untuk melakukan akad tabarru
4. Tidak dapat dirubah menjadi akad tijarah
5. Dapat dirubah menjadi akad tijarah, jika ada persetujuan sebelumnya

Namun sebaliknya akad tijarah dapat berubah menjadi akad tabarru' sepanjang salah satu pihak yang tertahan haknya itu telah melapaskan haknya, perubahan ini selanjutnya membawa konsekwensi pada batalnya keharusan pihak lain untuk membayar kewajibannya[17] secara singkat perubahan tersebut dapat di lihat pada ilustrasi dibawah ini.



Gambar 1.1 Perubahan Fungsi Akad

Sumber : Adiwarman A Karim, Islamic banking, Fiqh and Financia Analysis

Dari paparan diatas dapat dimengerti bahwa pada dasarnya pinjaman al-Qarḍul Ḥasan merupakan pinjaman social murni dengan tanpa adanya tambahan beaya apapun, hanya saja sejalan dengan perkambangan dunia

[17] Adiwarman A Karim, *Islamic banking, Fiqh and Financia Analysis*, 3th edition, Cet. I (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal.67

ekonomidan perbankan, maka kepada al-Qardul Ḥasan tetap di kenakan beaya administrasi dan hal ini secara fiqhiyah kiranya juga dibenarkan mengingat : Apabila suatu kewajiban (urusan) itu tidak dapat dilakukan kecuali setelah pemenuhan suatu factor tertentu, maka memenuhi factor tersebut menjadi wajib adanya, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fiqhiyah berikut :[18]

ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب

Beaya administrasi juga merupakan penunjang kontrak atau untuk menjauhkan dari riba, maka beaya administrasi :

1. Harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase
2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti secara terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Adapun pembebasan dari kewajiban membayar kembali pinjaman apabila mengalami kesulitan adalah suatu rukhshah atau keringanan, sementara hokum asalnya adalah tetapnya kewajiban mengembalikan barang pinjaman, sebagaimana di kehendaki dalam Firmnan-Nya :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فرهنٌ مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدّ الذي أؤتمن أمنته ,وليتق الله ربّه

"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bernuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperolah seorang penulis, maka hendaklah ada barang tangggungan yang di pegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka

[18] Abdul Hamid Hakim, *Mabādi Al-Awwaliyah* , (Jakarta : Sa'adiyah Putra, tt), hal 2

hendaklah yang dipercayai tiu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya". QS al-Baqarah (2) : 283[19]

Juga seperti di sabdakan baginda Nabi

من أخذ اموال النّاس يريد اداءها ادّى الله عنه ومن أخذ يريد إتلا فها اتلفه الله

"Barang siapa yang meminjam harta seseorang disertai dengan niatan untuk mengembalikannya, maka Allah akan melunasinya, dan barang siapa yang meminjam dengan niatan untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan merusakanya.[20]

Kemudian mengigat bahwa kegiatan ekonomi tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka dengan memperhatikan hal-hal diatas ditetapkan prinsip-prinsip/falsafah pembiayaan dari bank syari'ah, dimana dalam elaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi 2 (dua) syarat:

1. Aspek Syari'ah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap perpedoman kepada syari'at Islam, antara lain tidak mengandung unsur Maisir, Gharar, Riba serta bidang usahanya harus Halal.

   Dalam kaitan ini Adiwarman Karim menambahkan, bahwa dalam mu'amalat semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Adapun penyebab haramnya suatu transaksi ada 3.

   a) Haram Zatnya

   b) Haram selain Zatnya, misalnya melanggar prinsip An Taradhin Minkum serta prinsip La Tadlimu Wala Tudlamun

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : Thaha Putra, 1995) hal. 71

[20] Imām Abi Abdillah ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣahīh Bukhārī*, "Kitab Fī al-Istiqrad wa Adā' Ad-Duyūn wa al-Hajar wa al-Taflis", "Bab Man Akhoża Amwāl an-Nas Yurīd Adā'ahā au Itlāfahā", Juz III, (Semarang : Thaha Putra, tt) hal. 82

c) Tidak sah akadnya yang bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad/transaksi, terjadi ta'alluq dan lain sebagainya[21]

2. Aspek ekonomi, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal syar'iyah, bank syari'ah harus tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah[22]

Selanjutnya pejabat bank harus kredibel dan professional, kredibilitas dimaksud berarti kepercayaan masyarakat kepada bank syari'ah berkenaan dengan dana titipan yang mereka amanatkan dan dana pinjaman yang mereka manfaatkan. Kredibilatas bank syari'ah meliputi :

a. Kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah
b. Kesediaan untuk sama-sama menang dengan nasabah
c. Ketaatan dalam mematuhi atau memenuhi aspek-aspek legal yang berlaku
d. Keterbukaan dalam menginformasikan perkembangan bank
e. Kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah khusus
f. Kesehatan stuktur permodalan bank[23]

Disamping standar profesional dan kredibilitas diatas, bank syari'ah harus pula selalu melakukan ijtihad yang diwujudkan dengan berfikir kreatif dan inovatif, karena inovasi produk pelayanan perbankan menjadi ciri utama keberhasilan suatu bank, sehingga kemampuan menciptakan produk baru yang bener-bener dapat menarik konsumen sesuai dengan kebutuhan waktu itu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[21] Adiwarman A Karim, *Islamic banking*..... hal.34

[22] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), hal. 16

[23] Ibid. hal. 28

atau waktu yang akan datang[24] akan dapat memajukan bank-bank yang bersangkutan

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam membahas dua (2) pokok masalah diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan titik berat kepada penelitian literatur (*library Research*), yakni dengan menelaah berbagai literatur yang ada baik yang berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

2. Sumber Data

a). *Data Primer*, adalah data yang di peroleh dan di gali dari sumber-sumber utama, yakni dari buku-buku tentang bank syari'ah dan keuangan khususya yang membicarakan produk al-Qarḍul Ḥasan serta dari kitab-kitab fiqh yang membahas tetang al-qard, yang menjadi objek penelitian ini, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif., juga data dari laopran-laporam berkala pimpinan-bank-bank syari'ah

b) *Data Sekunder*, Yaitu semua jenis data yang di peroleh dan di gali dari pengolahan pihak kedua, yang berasal dari penelitian lapangan, baik yang berupa data kualitatif maupun data kuantitatif, Data-data dimaksud dapat di ambil dari buku-buku, laporan-laporan, journal-journal dan lain-lain, dintaranya adalah hasil penelitian tentang NPL (*Non Performance Loan*) al-Qarḍul Ḥasan di BNI Cabang Yogyakarta

[24] A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi hal.*94

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

oleh Firdaus Furywardhana tahun 2006, yang penulis jadikan pintu masuk dan acuan utama untuk membahas pokok masalah diatas..[25]

3. Analisa Data

Data-data yang telah terkumpulkan tersebut, nantinya akan di analisa dengan menggunakan teknik **Analisis Kualitatif.** Yaitu teknik bekerja dengan data-data, yang dimulai dari mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain.[26] Atau sebagaimana dinyatakan oleh Iqbal Hasan tentang analisa kualitatif, maka semua data-data tentang al-Qarḍul Ḥasan yang telah dapat di kumpulkan nantinya akan di uraikan dan di analisa untuk kemudian di ambil kesimpulan, kaitannya untuk menjawab dua (2) pokok masalah diatas.[27]

Selanjutnya dalam menganalisa data yang ada, pertama-tama akan di gunakan Metode Perbandingan Tetap (*constant comparative method*). Seperti yang dikemukakan oleh Glaser dan Strauss, bahwa Metode Perbandingan Tetap mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[25] Muhammad Teguh, *Methode Penelitian Ekonomi*, Cet. I (Jakarta : Raja Grafindo, 1999), hal. 121-122

[26] Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi, Cet. 23 (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 248

[27] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Cet. I (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hal.30

a. Reduksi Data yaitu mengidentifikasi adanya satuan yakni bagian terkecil yang di temukan dalam data yang memilki makna bila dikaitkan dengan pokok masalah

b. Kategorisasi, yaitu upaya memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan

c. Sintesisasi, yaitu mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainya.

d. Menyusun "Hipotesis Kerja". Hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang proporsional. Hipotesis kerja dimaksud sudah termasuk atau merupakan *teori subtantif* (yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data) karena sesungguhnya hipotesis kerja hendaknya terkait dan sekaligus *menjawab pertanyaan peneliti.*[28]

Kedua, setelah langkah-langkah diatas selesai semuanya, selanjutya data yang telah tersusun itu akan di analisa kembali berdasarkan teknik analisa SWOT, yakni teknik analisa untuk dapat menggunakan segala kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang-peluang yang ada serta mengantisipasi ancaman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan alternatif-anteratif jawaban dan pemecahan pokok masalah.

Ketiga atau pada tahap akhir, hasil analisa SWOT yang telah jadi yang berwujud beberapa alternative jawaban dan pemecahan masalah tersebut, akan di kaji kembali berdasarkan nash-nash al-Qur'ān ataupun as-Sunnah

[28] Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*.... Hal. 288-289

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengingat semua jawaban harus direkomendasikan oleh syar'i atau paling tidak berdasarkan teori atau pedapat dari para fuqoha, baik yang diistilahkan dengan ulama salaf ataupun ulama' muta'akhirin, serta akan di sinkronkan pula dengan teori-teori atau kaedah-kaedah dalam dunia perbankan syari'ah atau teori lainya yang relevan dalam upaya memecahkan pokok masalah diatas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dua pokok masalah diatas, maka masalah-masalah tersebut akan di bahas dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan, yang berfungsi sebagai pondasi dan pembuka dalam problem solving secara ilmiyah, maka dalam bab ini akan di uraikan tentang ; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian berkut telaah pustaka yang telah penulis lakukan kaitannya dengan buku atau jurnal ilmiyah yang membahas masalah al-Qarḍul Ḥasan yang di angkat, kemudian penulis paparkan pula metode penelitian, sistematika pembahasan, juga yang sangat penting adalah kerangka teoritik, yang dengan itu nantinya akan menjadi jalan masuk untuk memecahkan pokok masalah.

Dengan asumsi untuk dijadikan sebagai kerangka dasar berfikir dalam upaya meningkatkan keunggulan kompetitif al-Qarḍul Ḥasan, maka Bab II, berjudul "Landasan Teori" yang didalamnya akan di elaborasi lebih dalam tentang konsep Qarḍ, yang meliputi pengertian, landasan hukum, syarat-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

rukun, barang-barang yang dapat dijadikan objek Qarḍ, tata cara pengembalian, sumber dana, manfaat al-Qarḍ dan lain-lain.

Kemudian dalam rangka studi untuk pengembangan keunggulan kompetitif al-Qarḍul Ḥasan agar dapat menjadi produk yang lebih kompetitif, maka di anggap penting untuk membandingkannya dengan produk sejenis, baik dari bank konvensional atau lembaga keuanga lainnya, yang kemudian akan di lihat sisi-sisi baiknya dan kemungkinannya untuk dicangkokkan kepada al-Qarḍul Ḥasan dalam bingkai aturan syari'ah. Untuk itu dalam bab ini akan di paparkan pula model pembiayaan yang memiliki banyak kesamaan yakni *Modal Ventura*. Pembahasan mengenai model pembiayaan lewat modal ventura diatas, diantaranya akan di bahas mengenai pengertian, landasan hukum, tata kerja, pola pembiayaan dan lain-lain yang berkaitan dengannya.

Bab selanjutnya akan berbicara tentang aplikasi al-Qarḍ dalam sistim perbankan syarīah, yang akan terangkum dalam bab III. Sebagaimana diketahui produk al-Qarḍul Ḥasan yang di lakukan oleh bank-bank syarī'ah adalah pengembangan dari konsep al-Qarḍ dalam kajian fiqh klasik. Maka dalam bab ini akan di paparkan data-data yang berkenaan dengan penerapan atau aplikasi produk dimaksud oleh bank-bank syarī'ah. Pemaparan ini sangat penting utamanya untuk mengetahui sisi-sisi kelebihan dan sisi-sisi kekurangannya. Oleh karena itu diantaranya nanti akan di sajikan tentang sistim pegelolaan al-Qarḍul Ḥasan, jumlah peminjam, jumlah uang yang di pinjamkan, prosedur pemijaman/pembiayaan, alokasi penggunaan pembiayaan oleh nasabah, tingkat non Performance loan (NPL)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bagian terpenting dari tesis ini adalah bab tentang analisa, yang jatuh pada bab IV. Maka bab ini akan menelaah data-data yang tersaji dalam bab sebelumnya untuk menjawab pokok masalah diatas. Adapun analisa yang bisa di lakukan adalah : *pertama*; Analisis tentang adanya kemungkinan meningkatan keunggulan kompetitif produk al-Qarḍul Ḥasan melalui pengembangan fungsi serta pemanfatannya dan atau manajemen pengelolaannya, *kedua*; Analisa tentang lembaga yang paling berkompeten untuk mengelola produk al-Qarḍul Ḥasan kaitanya dengan profesioanlisme. Pembahasan masalah ini kemudian akan di akhiri pada bab V yang diantaranya berisi tentang kesimpulan atas analisa yang telah dilakukan dan saran-saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan produk al-Qarḍul Ḥasan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Al-QARḌUL ḤASAN

1. Pengertian

Secara epistemologi al-Qarḍ berarti memotong, dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Sedangkan secara terminology al-Qarḍ berarti harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (peminjam) untuk kemudian dikembalikan lagi kepada pemberi pinjaman sebagaimana awalnya (pokoknya) manakala ia telah mampu, sebagaimana di nyatakan oleh Sayid Sābiq berikut ini :

القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه

" al-Qarḍ adalah harta yang oleh pemberi pinjaman (*kreditur*) dipinjamkan kepada peminjam (*debitur*) dan akan dikembalikan lagi kepadanya sebesar pokok pinjaman awal manakala ia telah mampu utuk mengembalikannya"[1]

Ada pula yang mengartikan al-Qarḍ adalah suatu akad tertentu dengan tujuan untuk memberikan harta kepada orang lain, dan kemudian di kembalikan lagi kepadanya sebagimana bentuk awalnya[2]

Dalam kajian fiqh, akad al-Qarḍ dikategorikan sebagai akad *Tabarru'* yakni akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit, yang termasuk dalam kategori ini di samping al-Qard adalah, ar-Rahn, al-Ḥiwālah, al-Wakālah, a-Waqf as-

---

[1] Muhammad Sayid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. III, (Kairo : Dār al-Fatḥ Li I'lām al-Arabī, 1995), hal. 191

[2] Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adilatuhu*, Juz. 5. Cet. 4 (Kairo Dār Al- Fikr, 2004), hal. 3786

Ṣadāqah dan lain-lain. Kemudian jika dilihat dari objek pinjamannya akad tabarru' dapat di golongkan menjadi :

a. Jika akad tersebut harus mengembalikan pokoknya saja di sebut al-Qarḍ
b. Jika akad tersebut tidak harus mengembalikan pokoknya di sebut al-Qarḍul Ḥasan
c. Jika pinjaman mensyaratkan adanya jaminan yang ditahan, maka di sebut ar-Rahn
d. Jika mensyaratkan adanya piutang dari yang meminjam, maka di sebut al-Ḥiwālah[3]

Al-Qarḍ sendiri berarti pinjaman, sedangkan al-Ḥasan bermakna kebaikan atau kebajikan (*benevolent*). Dengan demikian al-Qarḍul Ḥasan mengisaratkan semangat kerjasama (تعاون) serta persaudaraan (أخوة) antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan yang menerima pinjaman (debitur), sehingga dengan menerima pinjaman tersebut penerima pinjaman dapat memenuhi segala kebutuhannya disertai kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman, selanjutnya pemberi pinjaman dapat menghibahkan (*grant gift*) pinjaman dimaksud kepada peminjam, apabila peminjam tidak mampu megembalikan dengan catatan hibah tersebut tidak di sebutkan dalam akad.[4]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa al-Qarḍul Ḥasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent*, tanpa pengenaan biaya apapun selain pokok pinjaman dan apabila terjadi kerugian yang bukan di

[3] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), hal. 84

[4] Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Market* (Malaysia : Dinamas Publishing, 2005), hal.161

sebabkan oleh kesengajaan peminjam, maka peminjam tidak wajib mengembalikan pinjaman. Namun seiring dengan perkembangan dunia ekonomi dan perbankan pengenaan biaya administrasi tidak mungkin dapat di elakkan, misalnya untuk biaya materai, biaya pegawai bank dan lain-lain, maka dalam pinjaman al-Qarḍul Ḥasan tetap dikenakan biaya administrasi.[5]

Kemudian dalam aplikasinya pada sistim perbankan syari'ah al-Qarḍul Ḥasan berarti adalah perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah yang dianggap layak menerima, dengan prioritas bagi pengusaha kecil yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang dalam keadaan terdesak. Penerima pinjaman hanya diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo, dan bank harus membebani nasabah atas biaya administrasi dan biaya lainya untuk keperluan pembuatan perjanjian dimaksud.[6]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Dasar Hukum

Sebagaimana di ungkapkan oleh Wahbah Zuḥailī bahwa hukum transaksi atau akad al-Qarḍ adalah Jaiz (diperbolehkan). Berdasarkan ayat al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma' ulama'. Terdapat beberapa ayat yang mengajarkan kepada kita untuk meminjamkan sesuatu bagi "Agama Allah", selain meminjamkan bagi agama Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama diantara ayatnya adalah :

---

[5] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 42

[6] Arsip BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta

a. Al-Qur'ān

من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضعفه له وله أجرٌ كريم

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" QS. al-Ḥadīd (57):11.[7]

واقيمو الصّلواة وآتوا الزكواة واقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقد موا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجراً

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya" QS al-Muzammil (73): 20.[8]

b. Al-Ḥadīś

1) Hadīś dari Abdullah ibn Mas'ud

عن عبد الله بن مسعود أنّ النبي صلعم قال : ما من مسلم يقرض مسلماً قرضا مرّتين إلا كان كصد قتها مرّة

"Dari Abdullah Ibn Mas'ud, bahwasannya Nabi SAW Bersabda : Tidak seorang muslimpun jika meminjamkan kepada muslin lainnya dua (2) kali, kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah"[9]

2) Ḥadīś dari Anās bin Mālik

قال رسول الله صلعم : رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً الصد قة بعسر أمثالها والقرض بثمانيه عشر ,

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Thaha Putra, 1995), hal. 902

[8] *Ibid.* hal. 990

[9] Abī Abdullah Muhammad ibn Yazīd al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājah*, "19 Kitāb as-Ṣadaqāt". "Bab. al-Qarḍ", (Kairo : Dār al-Ḥadīṡ, 1998), Juz. II, Cet. I, 3640 Ḥadiṡ No. 2430

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأنّ السّائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلاّ من حاجة

"Rasulallah SAW Bersabda : Aku melihat pada waktu malam aku di Isra'kan, pada pintu surga tertulis; Sedekah di balas sepuluh kali lipat, dan qardh di balas delapan belas kali. Aku bertanya. "Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama daripada sedekah? Ia menjawab "'karena peminta itu minta sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan"[10]

3) Ḥadīś dari Abi Dardā'

أن النّبي صلعم قال : لأن أقرض دينارين ثمّ يردا، ثمّ أقرضهما احب إلي من أن أتصدق بهما

"Bahwasanya Rasulallah SAW Bersabda : Jika seandainya aku meminjamkan dua dinar kemudian dikembalikan dua dinar pula, kemudian aku pinjamkan lagi, maka hal itu lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengan dua dinar tadi"[11]

c. Ijma

Para Ulama' telah menyepakati bahwa al-Qard itu boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari oleh tabi'at manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, sementara Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.[12]

---

[10] *Ibid.* Hadis No. 2431
[11] *Ibid.* Hadis No. 2450
[12] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta Gema Insani Press, 2001), hal. 133

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa dalam akad al-Qarḍ itu diperbolehkan untuk di lakukan, dengan 2 (dua) syarat :[13]

1) Tidak boleh mensyaratkan adanya suatu manfaat

Perlu di perhatikan pula, bahwa dalam akad al-Qarḍ tidak diperkenankan untuk mensyaratkan sesuatu manfaat dalam akadnya, misalnya saya akan meminjamkan kepadamu sebuah sepeda motor namun engkau harus menjual sawahmu kepadaku. Hal ini mengingat bahwa al-Qarḍ adalah akad untuk mengambil manfaat dari barang yang di pinjam serta akad persaudaraan atau tolong menolong, sehingga jika disyaratkan satu manfaat lagi diluar manfaat barang yang di pinjamkan, maka hal itu idak sesuai lagi dengan tujuan al-Qarḍ, sebagaimana dimaksud dalam ḥadiś Nabi :

قال رسول الله صلعم : كلّ قرض جرّ منفعة فهوربا

"Rasulallah SAW bersabda : Setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah sama dengan riba"[14]

2) Hendaknya akad al-Qarḍ itu tidak bercampur dengan akad yang lain, misalnya antara akad al-Qarḍ dilakukan bersamaan dengan akad jual beli, sebagaimana sabda Nabi riwayat Amr bin Syu'aib.

قال رسول الله صلعم : لا يحلّ سلف وبيع

"Rasulallah SAW bersabda : Tidak sah melakukan (akad) qarḍ bersamaan dengan (akad) jual beli"[15]

---

[13] Wahbah Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islamī*....hal. 3796

[14] Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūg al-Marām*, "7.Kitāb al-Buyū", "5.Bāb. as-Salam, wa al-Qarḍ, wa ar-Rahn (Beirut: Maktabah Tijārah al-Kubra, tt) hal.182, " Ḥadiŝ nomor. 8

[15] *Ibid*.... "7. Kitab al-Buyū". "1. Bāb. Syurūtuhu wa mā Nahā Anhu", hal. 169 , Ḥadits nomor 20

3. Rukun al-Qarḍ

   a. Peminjam (*muqtariḍ*)

   b. Pemberi Pinjaman (*muqriḍ*)

   c. Dana *(qarḍ)*

   d. Serah terima (*ijab qabul*)

4. Syarat-syarat al-Qarḍ

   a. Kedua belah pihak telah cakap berbuat hokum, maka disyaratkan keduanya telah balig, berakal serta hendaknya dari orang yang terbiasa bersedekah, karena al-Qarḍ adalah akad tolong menolong.

   b Menurut jumhur ulama' bahwa semua barang dapat dijadikan objek al-Qarḍ (dapat dipinjamkan), seperti uang, biji-bijian dan juga barang-barang tak bergerak.

   c. Objek al-Qarḍ hendaknya dapat diketahui kadar atau kwantitasnya, misalnya menurut takaran, timbangan, jumlah dan lain-lain untuk memudahkan pada saat pengembalian[16]

   d. Dana yang di gunakan ada membawa manfaat

   e. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni muqtariḍ dan muqriḍ[17].

5. Barang-barang yang Dapat Dijadikan Objek al-Qarḍ

   Terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan objek al-Qarḍul Ḥasan, diantaranya ; Jumhur fuqaha' sepakat bahwa semua barang atau benda yang dapat diperjual belikan sah untuk dijadikan sebagai objek al-Qarḍ akan tetapi

---

[16] Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamiy*....hal. 3792

[17] Merza Gamal, "Rukun dan Syarat al-Qardh", dikutip dari *http://www.mail-archive.com/jamaah@arroyyan.com/msg03249.html - 15k*, 12 Juli 2007

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

tidak sah meminjamkan manfaat, seperti menunggui rumah seseorang agar pada saat lain rumahnya di tunggui oleh orang yang rumahnya telah di tungguiya.

Sedangkan menurut ulama' Hanafiah. Akad al-Qarḍ sah dilakukan atas barang-barang yang sejenis yaitu antara barang yang dipinjam dan yang dikembalikan tidak ada perbedaan dalam jumlah, misalnya berdasarkan system takaran, timbangan, hitungan ataupun panjang. Misalnya seseorang meminjam 5 meter kain, maka harus dikembalikan 5 meter dengan jenis yang sama atau lebih baik, Sedangkan menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah, akad al-Qarḍ dapat dilakukan atas semua barang yang memungkinkan untuk dijadikan barang jaminan baik berdasarkan sistim takaran, timbangann seperti emas dan perak ataupun berdasarkan pada jumlah seperti barang dagangan, modal usaha dan binatang ternak.[18]

6. Waktu Pengembalian al-Qarḍ

Menurut Jumhur fuqaha' bahwa dalam akad al-Qarḍ tidak diperbolehkan adanya persyaratan tenggang waktu atau jatuh tempo untuk mengembalikan barang pinjaman agar terhindar dari melakukan riba nasyī'ah, alasan yang diusung oleh jumhur fuqaha' adalah:

a. Karena akad al-Qarḍ adalah murni akad tabarru', sehingga bagi pemberi pinjaman/pembiayaan (kreditor) mempunyai hak untuk meminta kembali barangnya pada saat itu juga. mengingat akad al-Qarḍ itu menghendaki adanya pengembalian barang pinjaman, dan kewajiban untuk

[18] *Ibid.*, hal.3789- 3790

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengembalikannya itu seperti kewajiban mengantikan barang manakala seseorag merusakkan barang milik orang lain

b. Prinsip-prinsip dalam al-Qarḍ sesungguhnya identik dengan prinsip menjual dirham dengan dirham, maka tidak diperkenankan adanya penambahan barang pengembalian serta tempo pengembalian[19]

Namun menurut Ulama' Hanafiyah, bahwa dalam al-Qarḍ sesungguhnya tetap di bolehkan adanya tenggang waktu pengembalian, khususya karena salah satu sebab berikut :

1) Adanya wasiat, yaitu jika seseorang berwasiat untuk meminjamkan kepada seseorang dalam jangka waktu 1 tahun misalnya, maka ahli waris dilarang mengambilnya kembali sebelum genap 1 tahun.
2) Juhūd, yakni apabila pinjaman yang di terima itu di ingkari, maka pemberi pinjaman berhak menariknya kembali dari si penerima pinjaman, karena yang sedemikain itu sudah lazim dalam urusan pinjam meminjam
3) Adanya keputusan hakim tentang tetapnya barang pinjaman kepada penerima pinjaman (debitur) maka tidak diperkenankan bagi pemberi pinjaman (kreditur) untuk mengambil kembali pinjamannya
4) Adanya pemindahan hutang (Ḥiwālah)[20]

Berbeda dengan jumhur fuqaha' dan ulama' Hanafiyah yang hanya membolehkan adanya tenggang waktu pengembalian barang pinjaman secara terbatas, sebagaimana tersebut diatas. Maka menurut Imam Malik, bahwa dalam al-Qarḍ di perkenankan adanya tenggang waktu pengembalian barang

[19] *Ibid.*,hal. 3788
[20] Ibid.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pinjaman (waktu jatuh tempo) karena sesungguhnya cara inilah yang lebih dapat di terima serta lebih sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak[21], adapun sandaran pendapatnya adalah beberapa sabda Nabi dan ayat al-Qur'an berikut ini :

عن أبي هريرة عن رسول الله صلعم أنه ذ كر رجلا سأل بعضي بني إسرائيل ان يسلفه ألف دينار فد فعها إليه إلي أجلٍ مسمّى

"Dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW, bahwasannya Rasulullah bercerita tentang seseorang yang memohon kepada seseorang dari Banī Isrā'īl untuk meminjamkan seribu dinar yang akan dibayar pada waktu akan datang"[22]

عن عمر ابن عوف المزني عن ابيه عن جده , أنّ النبي صلعم قال :المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالا

"Dari Umar ibn Auf al-Mazanī dari ayahandanya dari kakeknya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda orang-orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat yang telah dibuatnya, kecuali syarat-syarat yang akan menghalalkan yang kharam da sebaliknya mengharamkan yang telah halal"[23]

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلي ميسرةٍ وإن تصدّ قوا خيراً لكم إن كنتم تعلمون

"Dan jika orang yag berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui" QS al-Baqarah (2) : 280.[24]

---

[21] Muhammad Sayid Sābiq, *Fiqh Sunnah*.....hal. 192

[22] Imam Abī Abdullah Muhammad ibn Isma'īl al-Bukhārī, *Shahīh Bukhāri*, "Kitāb asy-Syurūd", "Bab asy-Syurūd fī al-Qarḍ" (Semarang : Thaha Putra, tt), III. Hal. 184

[23] Ibn Hajar al-Asqalānī, *Bulūg al-Marām*, ..."7.Kitāb al-Buyū'", "7. Bab. as-Şulḥ".hal. 185, Ḥadiŝ nomor 1.

[24] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahya*..... Hal. 70

QS al-Baqarah ayat 280 itulah kiranya dasarnya untuk membebaskan penerima pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan untuk mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima, bila dalam usahnya ia megalami kesulitan akibat kegagalan usaha yang bukan karena di sengaja.

7. Sumber Dana

Pada dasarnya sumber dana al-Qarḍ adalah dari pribadi-pribadi orang yang ingin melakukan kebajikan dengan memberikan pinjaman kepada orang lain. Namun setelah konsep al-Qarḍ ini diadopsi kedalam sistem perbankan syari'ah yang kemudian di kenal dengan produk *al-Qarḍul Ḥasan*, tentu mengharuskan adanya bebarapa modifikasi untuk penyesuaian. Diantaranya adalah pihak-pihak yang melakukan akad, tidak lagi *man by man* akan tetapi berubah antara orang dengan lembaga yakni bank syari'ah, juga masalah sumber dana.

Oleh karena sifat al-Qarḍul Ḥasan yang tidak memberikan keuntungan financial kepada bank syari'ah, maka pendanaan al-Qarḍul Ḥasan dapat diambil menurut kategori berikut :

a. Al-Qarḍ yang di perlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, maka talangan dana tersebut dapat diambilkan dari modal bank.
b. Al-Qarḍ yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil, menengah dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah.
c. Disamping sumber dana umat, para praktisi perbankan syari'ah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat di alokasikan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

untuk al-Qarḍul Ḥasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang di ragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangannya adalah adanya kaidah أخف الضّررين (*mengambil madharat yang lebih kecil)*, mengingat jika dana umat Islam itu dibiarkan di lembaga-lembaga bank non muslim mungkin dapat di gunakan untuk keperluan-keperluan yang merugikan umat Islam.[25]

8. Manfaat al-Qarḍul Ḥasan

Secara umum manfaat al-Qarḍul Ḥasan antara lain:

a. Transaksi al-Qarḍul Ḥasan bersifat mendidik, dan peminjam (muqtariḍ) wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah, dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah atas hasil usahanya sendiri;

b. Dana zakat, infāq dan ṣadaqah sebagai dana sosial, akan selalu dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya;

c. Adanya misi sosial kemasyarakatan melalui skim al-Qarḍul Ḥasan, akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap ekonomi syariah serta kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, infaq dan shadaqah melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif semata;

---

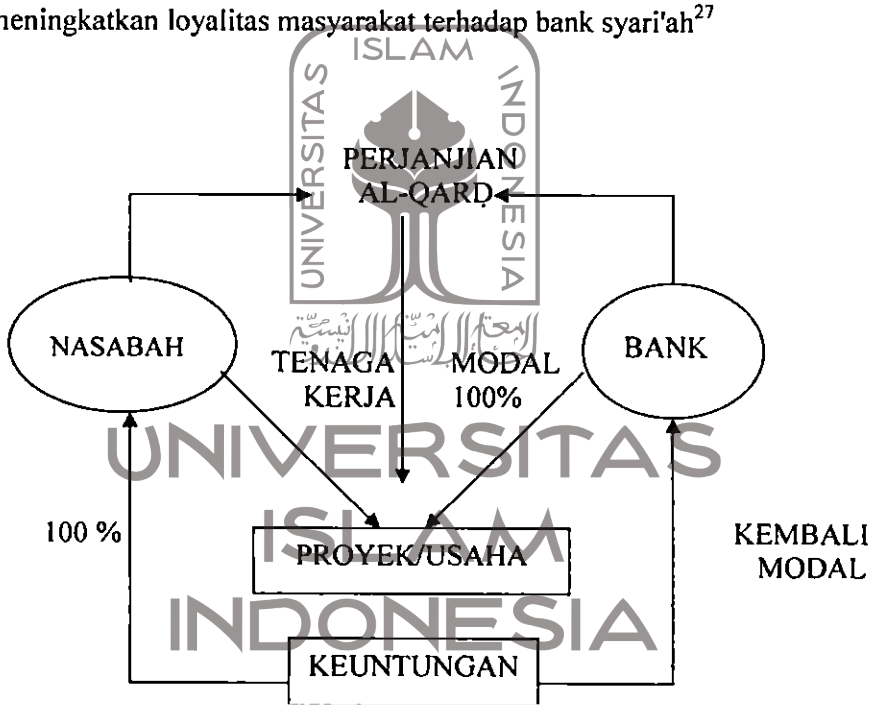
[25] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori* ..... hal, 133

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasiskan syariah Islam dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan[26]

Adapun manfaat khusus bagi bank syari'ah adalah :

a. Al-Qardul Hasan merupakan ciri pembeda antara bank syari'ah dengan bank konvensional, yang di dalamnya terkandung misi social disamping misi komersial
b. Adanya misi social ini tentunya akan dapat meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari'ah[27]



Gambar 2:1 Skema al-Qarḍul Ḥasan

Sumber : Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah

[26] Merza Gamal, "Mengenal Pijaman Qarḍ al-Ḥasan" dikutip dari *www.mail-archive.com/jamaah@arroyyan.com/msg03249.html - 15k*, 12 Juli 2007

[27] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori* .....hal 134

B. MODAL VENTURA

1. Pengertian dan Karakteristik Modal Ventura (MV)

Istilah Modal Ventura berasal dari bahasa Inggris *Venture capital*. Ventura merupakan serapan dari kata *Venture* yang berarti usaha yang mengandung resiko. Dikatakan resiko karena investasinya tidak di kaitkan dengan adanya jaminan[28].

Modal ventura dapat di definisikan dalam berbagai versi. Diantaranya adalah yang di kemukakan oleh Y Sri Susilo; bahwa modal ventura adalah suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Perusahaan yang menerima penyertaan modal disebut Perusahaan Pasangan Usaha (*PPU atau Investee Company*), dan perusahaan yang melakukan penyertaan modal di sebut Perusahaan Modal Ventura.(PMV)[29]

Sedangkan menurut Atmadjaja, modal ventura merupakan suatu bentuk kemitraan antara perusahaan besar dan pengusaha kecil terlepas dari ada atau tidak adanya keterikatan usaha. Perusahaan besar bertindak sebagai bapak angkat (*pemodal ventura*) bagi pengusaha keci dan menjadi penjamin kredit bank, selain itu perusahaan besar mempunyai kewajiban

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[28] Muhammad Abdul Kadir dan Murniati Rilda, *Segi Hukum Lembaga Pembiayaan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 181

[29] Y Sri Susilo Dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. I (Jakarta Salemba Empat, 2000), hal. 137

untuk membina usaha (dalam bentuk bantuan manajemen) dan turut serta sebagai penanggung resiko kerugian[30]

Sedangkan Gladstone mendefinisikan perusahaan modal ventura dengan "*The money ivested in a new company that shows a potential for fast growth is venture capital.*[31] Bila Atmadjaja menekankan pengertian modal ventura kepada "**hubungan pembinaan**", maka Gladstone lebih menekankan definisi modal ventura kepada "**modal yang ditanamkan**"

Dari beberapa pengertian diatas dapat kiranya ditarik benang merahnya, bahwa kombinasi antara bantuan permodalan dengan pendampingan manajemen itulah yang membedakan secara prinsip antara modal ventura dengan lembaga pembiayaan lainnya. Gladstone menyatakan perbedaan ini :

> The difference between a finance company and venture company is management assistant. You will find the venture capitalist more involved in your business than a finance company. He frequently reviews your operations and constantly makes suggestion. He is in essence, your business partner"[32]

Menurut Keppres No. 61/1988, perusahaan modal ventura (*venture Capital*) merupakan badan usaha pembiayaan melalui penyertaan modal kedalam suatu perusahaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu yang tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Setelah jangka waktu tersebut pemodal ventura dapat melakukan penarikan modalnya dari mitra usaha (*divestasi*). Prioritas penjualan saham diberikan kepada mitra usaha, jika

---

[30] Atmadjaja, "Modal Ventura : Salah Satu Bentuk Permodalan Usaha Kecil dan Menengah" dalam *Jurnal Bina Ekonomi Universitas Parahyangan*, tahun VI Mei 1999, hal. 36-43

[31] David Gladstone, *Ventura Capital Handbook New and Revised*, (New Jerse: Prentice Hall, 1988), hal. 3

[32] *Ibid.*

mitra usaha belum mampu, pemodal ventura dapat menjual sahamnya kepada pihak lain melalui prosedur *go publik*..

Dari paparan diatas, dapat dicatat 2 hal yang menonjol dari PMV; *Pertama*; Perusahaan Modal Ventura (PMV) terlihat lebih terlibat dalam bisnis perusahaan pasangan usaha (PPU)-nya dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. PMV juga secara berkala memberikan saran dan masukan bagi pengembangan usaha atau dengan kata lain PMV menjadi rekan bisnis, *Kedua*; bahwa sifat investasi modal ventura mengandung resiko yang lebih besar dibandingkan dengan hutang, kredit atau pinjaman biasa lainnya. Karena yang menjadi target PMV adalah PPU yang ingin mengembangkan usaha, baik pada tahap permulaan maupun pada tahap ekspansi, namun perusahaan tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh pembiayaannya, baik dari bank maupun dari pasar modal, tetapi ia memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang serta mempunyai kemampuan yang berkesinambungan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan menurut PT Bahana Artha Ventura[33] karakteristik PMV yang menonjol terlihat pada :

a. PMV merupakan akiva pembiayaan yang bersifat *risk capital* kepada perusahaan atau individu yang memiliki gagasan tanpa disertai adanya jaminan. Dasar utamanya adalah keyakinan atas kemampuan seorang wirausaha.

[33] BUMN yang bertugas mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah di Indonesia melalui modal ventura baik secara langsung atau melalui lembaga modal ventura daerah.

b. PMV bersifat aktif (*active investmen*) artinya penyertaan modal PMV kedalam PPU disertai dengan keterlibatan, jika perlu dalam unsur-unsur manajemen yang dapat menentukan keberhasilan usaha semisal : manajemen, finanasial, pemasaran serta pengawasan operasional.

c. Bersedia membiayai bisnis pada segala tingkat pertumbuhannya,

d. Penyertaan modal hanya bersifat sementara, biasannya 3-6 tahun, kemudian setelah PPU mencapai tingkat pertumbuhan tertentu PMV dapat menarik diri dengan menjual sahamnya

e. Keuntugan yang diperoleh oleh PMV bukanlah bunga atas modal tetapi dari deviden dan apresiasi nilai saham (*capital gain*)

2 Sejarah

Antara tahun 1920-1930 keluarga-keluarga kaya di Amerika Serikat, seperti Payson, Rockefeller dan Ford membentuk pendanaan pribadi, yang digunakan untuk menolong individu-individu yang mencoba menjalankan investasi potensial tetapi kekurangan modal, dan kegiatan ini terus menerus berkembang keseluruh dunia termasuk Indonesia yang dikenal dengan nama Modal Ventura. Di Jepang modal ventura diperkenalkan pertama kali tahun 1963, dengan berdirinya perusahaan SBIC di Tokyo, Osaka dan Nagoya. Pada tahun 1973 perusahaan sekuritas terbesar di Jepang (NAMURA) membentuk perusahaan modal ventura dengan nama JAFCO[34]

[34] Badrudin Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta : STIE YKPN, 1999), hal. 138

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan di Indonesia keberadaan modal ventura sudah dikenal sejak 1973 dengan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dengan tujuan menumbuh kembangkan kemampuan berusaha bagi usaha kecil dan menengah, dengan jalan penyertaan modal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil dan menengah. Namun pengakuan secara formal keberadaan modal ventura baru pada saat berlakunya Paket Kebijakan 20 Desember 1988 (Pakdes, 20.1988) yang menempatkan modal ventura sebagai salah satu kegiatan pembiayaan disamping bentuk-bentuk kegiatan pembiayaan lainnya.[35]

3. Sumber Dana Modal Ventura

Modal PMV dapat berasal dari modal sendiri yang bersal dari investor pribadi, perusahaan asuransi, pemerintah dan lain-lain atau dari pihak lain. Ditinjau dari cara menghimpun dana, PMV dapat dibedakan kedalam 2 kategori :

a. *Laverage Venture Capital*, yaitu apabila proporsi modal sendiri **lebih kecil** daripada proporsi modal yang di himpun dari pinjaman berbagai pihak, dan dana itulah yang nantinya akan diinvestasikan/disertakan kepada PPU (*investee company*)

b. *Equity Venture Capital*, yaitu apabila proporsi modal sendiri **lebih besar** daripada proporsi modal yang di himpun dari pinjaman berbagai pihak, dan dana itulah yang nantinya akan diinvestasikan/disertakan kepada PPU (*investee company*)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[35] Y Sri Susilo Dkk. *Bank dan Lembaga*.... Hal.138

4. Pola Pembiayaan Modal Ventura

Sebagaimana telah kami sebut diatas bahwa bantuan yang diberikan oleh PMV kepada PPU meliputi dua hal, bantuan financial dan bantuan manejemen. Adapun cara PMV memberikan 2 bantuan diatas dapat menggunakan mekanisme-mekanisme sebagai berikut :

a. Berdasarkan Cara Pemberian Bantuan

1) *Single Tier Approach*

Pendekatan ini menempatkan sebuah PMV dalam dua (2) fungsi sekaligus, sebagai pemberi bantuan pembiayaan (*fund company*) dan sekaligus sebagai pemberi bantuan manajemen atau pengelola dana (*management Company*). Berdasar pengertian ini maka haya ada 2 perusahaan yang terlibat, yaitu perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.

2) Two Tier Approach

Pendekatan ini memungkinkan sebuah PPU untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari PPV yang berbeda. Berdasarka pengertian tersebut, pihak-pihak yang terkait menjadi 3 pihak, yaitu 1 perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan pembiayaan, 1 perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan manajemen dan 1 perusahaan pasangan usaha.[36]

[36] Ibid., hal. 141-142

b. Prinsip-prinsip Pemberian Bantuan

1) Pembiayaan melalui modal ventura dapat diberikan dalam bentuk penyertaan modal secara langsung (*equity*) dan atau dapat pula dalam bentuk pinjaman subordinasi atau obligasi konservasi pada perusahaan yang disertai (*quasy equity*).

2) Bahwa pendekatan yang digunakan oleh PMV berkaitan dengan PPU yang di pilih adalah berdasarkan pemikiran jangka panjang. Pendekatan ini antara lain dapat dilihat dari cara pembagian keuntungan dimana pada tahap awal penyertaan PMV biasanya mendapatkan proporsi bagi hasil yang sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali.

3) Bantuan yang berikan memang memiliki misi jangka panjang, namun hal ini tidak berarti bantuan tersebut tanpa batas waktu. Penyertaan yang dilakukan oleh PMV pada dasarnya bersifat sementara sampai dengan batas tertentu. Batas waktu dimaksud sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Di Indonesia batas waktu dimaksud adalah 10 tahun, dan pada akhir masa penyertaan, PMV harus memilih berbagai macam cara untuk divestasinya.

Penerapan ketiga (3) prinsip diatas sangat diperlukan agar mekanisme dan proses yang dilakukan oleh PMV dapat berjalan sesuai degan pengertian dasar MV. Selanjutnya kunci dasar agar PPU dapat berkembang dan berdiri sendiri adalah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a) Bantuan diarahkan agar PPU dapat berdiri sendiri baik dari sisi pendanaan ataupun pengelolaan.

b) Kegiatan usaha di laksanakan dengan dukungan modal yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang

c) Kegiatan usaha di laksanakan dengan dukungan sumber daya manusia yang tepat baik dari sisi kwalitas, kwantitas dan proporsi untuk jangka panjang.

d) Kesepakatn atau perjanjian yang di buat harus tegas namun fleksibel terhadap kemungkinan perkembangan perekonomian da teknologi.

e) Dukugan modal dan sumber daya manusia dari PMV harus sesuai dengan karakteristik PPU.

5. Tahap Pemberian Pembiayaan

Pada dasarnya dalam tahap manapun PMV dapat memberikan bantuan sesuai dengan analisa mendalam terhadap kelayakan kegiatan usaha dari calon PPU. PMV tentuys tidak akan memberikan bantuan penyertaan terhadap PPU yang prospek untuk survive dan perkembangannya sangat di ragukan. Secara umum PPU dapat menerima bantuan dari PMV pada saat-saat berikut :

a. Pengembangan Ide Usaha

Pada tahap ini resiko yang dahadapi oleh PMV sangat besar, karena pada tahap ini kegiatan usaha masih dalam tahap pengembangan ide dasar yang masih belum di telaah oleh calon PPU. Tugas PMV adalah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

membantu pembuatan study kelayakan bisnis dari kegiatan usaha yang akan di lakukan oleh calon perusahaan pasangannya.

b. Awal Kegiatan Usaha

Pada tahap ini calon PPU sudah sangat yakin akan kelayakan dan prospek dari kegiatan yang akan di lakukan dan perusahaan bersangkutan telah siap untuk beroperasi. Tugas PMV adalah membantu memberikan dana dan manajemen untuk awal kegiatan usaha ini.

c. Awal Pengembangan Usaha

Pada tahap ini calon PPU telah berhasil memualai kegiatannya dan hasilnya menunjukkan tanda-tanda adanya prospek pengembangan usaha lebih lanjut. Kemudian apabila calon PPU masih merasa perlu mendapat bantuan dari PMV, maka PMV dapat memulai memberikan bantuannya.

d. Tahap Ekspansi

Pada tahap ini calon PPU telah berhasil melakukan usaha dengan baik dan berniat untuk melakukan pengembangan antara lain berupa peningkatan omzet, peningkatan pangsa pasar, perluasan target pasar, diversifikasi usaha, pembukaan cabang dan lain-lain. Meskipun pada tahap ini calon PPU telah mampuuntuk memperoleh pinjaman modal dari bank atau pihak lain, namun kehadiran PMV masih tetap bisa di harapkan untuk menopang keperluan adanya dana yang lebih besar dan lebih lancar.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e. Tahap Kejenuhan atau Penurunan

Seiring dengan ketatnya persaingan, adanya krisis ekonomi, perubahan selera konsumen, perubahan kebijakan pemerintah, dan lain-lain sebab yang mungkin timbul, yang pada gilirannya mengakibatkan turunnya kepercayaan bank dan lain-lain lembaga kreditur, atau terjadi kesulitan manjerial dari calon PPU, maka kehadiran dan bantuan dari PMV tidak mustahil diberikan pada tahap ini.

6. Bentuk-Bentuk Pembiayaan

Perusahaan modal Ventura dapat memberikan bantuan pembiayaan dalam satu atau lebih bentuk-bentuk dibawah ini :

a. Penyertaan modal dalam bentuk saham
b. Obligasi yang dapat di konversikan menjadi saham
c. Pinjaman yang dapat di konversikan saham
d. Pinjaman yang memberikan hak opsi bagi perusahaan modal ventura untuk membeli saham
e. Pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah
f. Pinjaman yang tidak perlu dibayar apabila perusahaan belum mampu menutup semua biaya operasional
g. Pinjaman yang apabila terjadi likuidasi, maka pengembaliannya berada pada prioritas setelah obligasi dan pinjaman lainya
h. Dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip modal ventura

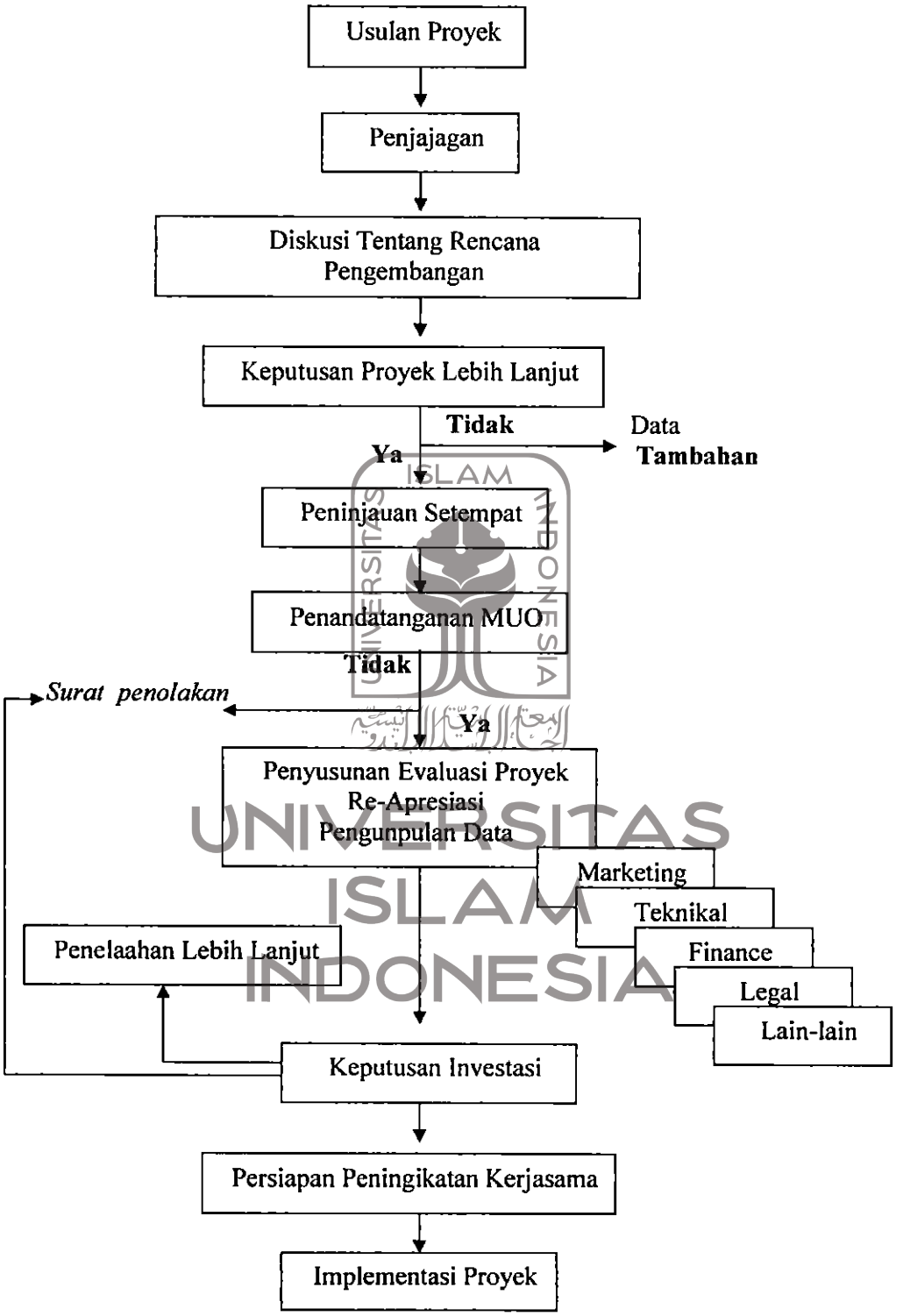
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

7. Cara-Cara Divestasi

Mengingat bahwa penyertaan modal PMV kepada PPU bersifat sementara, maka kedua belah pihak harus memikirkan cara-cara divestasi yang akan dilaksanakan.Divestasi tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara berikut :

a. *Pembelian kembali* saham modal ventura oleh PPU apabila PPU telah cukup mampu
b. *Go-Publik* atau penawaran saham melalui pasar modal, apabila PPU kondisinya betul-betul sehat dan prospektif sehingga sahamnya nanti dapat dijual dengan harga yang wajar.
c. *Pemberian kredit* atau pinjaman dari bank. Sebagai pengganti modal yang ditarik, maka PMV menghubungkan PPU dengan bank atau pihak lain untuk mendapatkan kredit atau pinjaman.
d. *Perusahaan Pasangan Usaha Dijual* kepada pihak lain apabila terdapat perusahaan yang tertarik untuk memiliki PPU tersebut, baik dengan cara tunai maupun dibeli dengan saham
e. *Perusahaan Pasangan Usaha Dilikuidasi*. Cara ini hanya di tempuh apabila cara-cara lain sebagaimana yang telah disebut diatas tidak mungkn untuk di lakukan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Gambar 2:2 Skema Alur Pembiayaan Lewat Modal Ventura
Sumber : Muh. Abdul Kadir, Segi Hukum Lembaga Pembiayaan di Indoesia

mitra usaha belum mampu, pemodal ventura dapat menjual sahamnya kepada pihak lain melalui prosedur *go publik*..

Dari paparan diatas, dapat dicatat 2 hal yang menonjol dari PMV; *Pertama*; Perusahaan Modal Ventura (PMV) terlihat lebih terlibat dalam bisnis perusahaan pasangan usaha (PPU)-nya dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. PMV juga secara berkala memberikan saran dan masukan bagi pengembangan usaha atau dengan kata lain PMV menjadi rekan bisnis, *Kedua*; bahwa sifat investasi modal ventura mengandung resiko yang lebih besar dibandingkan dengan hutang, kredit atau pinjaman biasa lainnya. Karena yang menjadi target PMV adalah PPU yang ingin mengembangkan usaha, baik pada tahap permulaan maupun pada tahap ekspansi, namun perusahaan tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh pembiayaannya, baik dari bank maupun dari pasar modal, tetapi ia memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang serta mempunyai kemampuan yang berkesinambungan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sedangkan menurut PT Bahana Artha Ventura[33] karakteristik PMV yang menonjol terlihat pada :

a. PMV merupakan akiva pembiayaan yang bersifat *risk capital* kepada perusahaan atau individu yang memiliki gagasan tanpa disertai adanya jaminan. Dasar utamanya adalah keyakinan atas kemampuan seorang wirausaha.

---

[33] BUMN yang bertugas mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah di Indonesia melalui modal ventura baik secara langsung atau melalui lembaga modal ventura daerah.

BAB III

APLIKASI AL-QARḌUL ḤASAN DALAM SISTEM PERBANKAN SYARI'AH

A. Posisi al-Qarḍul Ḥasan

Dari hasil musyawarah (*Ijma' Internasional*) para ahli ekonomi muslim beserta para ahli fiqh dari akademi fiqh di Makkah pada tahun 1973, dapat di simpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan syari'at Islam dalam sistim ekonomi Islam, ternyata dapat di terapkan dalam operasional lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Secara garis besar produk-produk dari bank syari'ah dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian, yaitu :

1. Produk penghimpun dana. Peghimpunan dana dari pihak ketiga oleh bank syari'ah dilakukan dengan dua prinsip, yaitu : prinsip al-wadī'ah, dan prinsip al-muḍārabah,
2. Produk penyaluran dana. Sesuai dengan fungsinya sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, maka dana yang sudah terkumpul tadi kemudian di salurkan melalui tiga model :
   a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli
   b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa di lakukan dengan prinsip sewa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dilakukan dengan prinsip bagi hasil

3. Produk jasa. Dalam sistim perbankan syari'ah produk jasa dikategorikan sebagai produk pelengkap dari dua produk diatas, satu diantara bentuk-bentuk produk jasa adalah al-Qarḍul Ḥasan [1]

Hendaknya perlu difahamkan bahwa; meskipun al-Qarḍul Ḥasan masuk dalam kategori akad pelengkap, namun ia memiliki posisi strategis yang tidak dapat di hilangkan, bahkan harus terus di kembangkan khususnya dalam mengimbangi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu suatu bentuk kegiatan social dari perusahaan-perusahaan swasta dan juga bank-bank konvensional sebagai wujud tanggugjawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya, dan juga program *Corporate Citizenship* (CC) yaitu cara perusahaan bersikap atau memperlihatkan perilaku ketika berhadapan dengan pihak lain, sebagai salah satu cara memperbaiki reputasi dan meningkatkan keunggulan kompetitif. CSR dan CC tersebut dilakukan melalui manajemen internal perusahaan serta serta dengan memberikan bantuan sumberdaya untuk pembangunan sosial dan kemitraan dengan masyarakat bukan bisnis dan masyarakat luas.[2]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[1] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Cet II (Yogyakarta : Ekonosia 2005), hal. 86-99

[2] Tony Djogo " Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Social Responsibility)" dikutip dari *http://www.beritabumi.or.id/artikel3.php?idartikel=173 - 30k* tgl 8 Juni 2007

B. Pengelola Dana al-Qarḍul Ḥasan

Sebagaimana telah di singgung dimuka bahwa produk al-Qarḍul Ḥasan merupakan produk spesifik dari bank-bank syari'ah sehingga menjadi salah satu ciri pembedanya dengan bank konvensional. Namun dalam prakteknya tidak semua bank syari'ah mengelola sendiri dana al-Qarḍul Ḥasan ini, walau demikian ada kesamaan prinsip dalam pengelolaannya diantara bank-bank syariah, bahwa dana al-Qarḍul Ḥasan itu di kelola oleh bank syari'ah pusat sedangkan kantor cabang hanya berfungsi sebagai unit pengumpul zakat, infaq dan ṣadaqah (UPZ) dan juga sekaligus sebagai pintu untuk penyaluran dana dimaksud.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengelola dana al-Qarḍul Ḥasan sepenuhnya di serahkan kepada Baitul Maal Muamalat (BMM), awalnya pada tahun 1997 BMM adalah sebuah divisi kecil dalam struktur BMI yang bernama ZIS Muamalat, diantara tugasnya adalah menghimpun dana ZIS di lingkungan kerja BMI sekaligus mendistribusikannya kepada masyarakat miskin. Memasuki tahun 2000 tepatnya tanggal 16 Juni 2000 dua direksi BMI yaitu A. Riawan Amir dan Suhadji L. bersama Wahyu Dwi Agung membentuk Baitul Maal Muamalat (*BMM*) yang independent dan terpisah dari struktur BMI. Berikutnya pada tahun 2001 BMM secara resmi mendapat pengakuan menjadi LAZ Nasional dari Depag RI.[3]

Senada dengan BMI, Bank Syari'ah Mandiri (BSM) dalam rangka untuk mengelola dana zakat, infaq dan ṣadaqah secara propesional, terhitung tanggal

[3] Dikutip dari *http://www.baitulmaal.net/modules.php* tanggal 3 Juni 2007

17 September 2002 juga telah membentuk badan tersendiri dengan nama Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (*LAZ BSM Umat*) untuk mengumpulkan dan sekaligus mengelola dana ZIS yang merupakan sumber utama dana al-Qarḍul Ḥasan.

C. Sumber Dana dan Penggunaannya

Seperti telah di ungkap dalam bab pendahuluanm, bahwa ada 3 sumber pendanaan untuk akad al-Qarḍul Ḥasan, modal bank syari'ah sendiri, dana ZIS yang dapat di himpun dari masyarakat serta pendanaan dari sumber-sumber yang diragukan. Dari ketiga sumber tersebut kalau masing-masing dapat berjalan dengan baik, maka produk al-Qarḍul Ḥasan akan didukung oleh cadangan dana yang sangat besar, lebih-lebih jika dana dari ZIS dapat di gali secara optimal dari waktu kewaktu, maka al-Qarḍul Ḥasan akan memiliki sumber dana yang hampir tak terbatas

Sebagai perbandingann dan gambaran dari optimalisasi pengumpulan dana ZIS, adalah laporan LAZ BMM Umat milik bank syari'ah mandiri, yang juga mengelola al-Qarḍul Ḥasan, sebagaimana di lansir oleh harian Republika melaporkan bahwa dana yang dimiliki oleh BMM di dapatkan dari zakat keuntungan perusahaan (Bank Syari'ah Mandiri) zakat serta infaq dari para karyawan, zakat bagi hasil nasabah BSM maupun non nasabah serta ZIS dari perseorangan ataupun perusahaan, yang hingga akhir Juli 2006 telah terkumpul dana sebesar Rp. 18.32 miliar[4]

[4] Dikutip dari *http://www.republika.co.id/.../cetak_detail.asp?* tanggal 2 Agustus 2007

Dana tersebut sesugguhnya masih terlalu kecil jika di lihat dari potensi dana ZIS yang sesungguhnya dapat di himpun. Potensi ZIS secara nasional berdasarkan hasil penelitian Departemen Agama RI tahun 2000 adalah sebesar Rp. 7.5 triliun per tahun, namun setiap tahunnya lembaga ZIS seluruh Indonesia baru bisa menggali kurang lebih Rp. 600 miliar. Dari 600 miliar tersebut sebagian besar di kelola oleh 6 LAZ, yaitu Rumah Zakat Indonesia (*RZI*), Dompet Peduli Umat Darut Tauhid (*DPU-DT*), Pos Keadilan Peduli Umat (*PKPU*) Baitul Maal Mu'a,malat (*BMM*) dan Yayasan Dana Sosial al-Falah (*YDSF*) Surabaya.[5] Hal ini sekaligus menenjukkan bahwa mobilisasi dana ZIS lewat institusi bank syari'ah belum optimal.

Adapun potensi ZIS DIY sendiri sebagaimana di sampaikan oleh M. Akhyar Adnan, diperkirakan mencapai Rp. 42.5 miliar per bulan atau Rp.510 miliar pertahun dengan asumsi bahwa jumlah penduduk DIY kurang lebih berjumlah 3 juta jiwa, 80% diantaranya atau 2.4 juta orang adalah muslim. Dari Jumlah tersebut diasumsikan kembali bahwa 500.000 orang, 20% dari jumlah itu adalah muzaki sedangkan sisanya 80% adalah mustahiq. Para muzakki itu kemudian di kelompokkan dalam tiga (3) kategori : 100.000 orang berpenghasilan Rp. 1 juta perbulan, 200.000 orang berpenghasilan Rp. 5 juta perbulan, 200.000 orang berpenghasilan Rp. 5 juta perbulan. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5] Harian Pikiran Rakyat "Ironi BAZ" dikutip dari *http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2006/052006/19/99kolom*, tanggal 17 Agustus 2007

Estimasi angka 7.5 triliun diatas didapat berdasarkan pada asumsi Badan Pusat Statistik (BPS) pusat, bahwa 90% penduduk Indonesia adalah beragama Islam dengan 40 juta keluarga, dan sebagian dari 40 juta itu 32 juta keluarga merupakan penduduk sejahtera yang berpenghasilan Rp. 10 juta atau 1 miliar pertahun. Dengan kwajiban membayar zakat 2.5% dari batas nisab (setara 85 gram emas) maka akan di dapatkan angka Rp. 7.5 triliun.

penerapan zakat 2.5 % dari penghasilan rata-rata muzakki diatas, maka akan terkumpul minimal Rp. 42.5 miliar perbulan.[6]

Selanjutnya dana al-Qarḍ yang telah dapat dihimpun oleh bank-bank syari'ah itu dilakukan pentasarufannya dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Al-Qarḍ yang di perlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, maka talangan dana tersebut dapat diambilkan dari modal bank.
2. Al-Qarḍ yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil, menengah dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah

Untuk jenis pembiayaan yang menggunakan modal bank, hampir semua bank syari'ah mengelola dan melakukannya sendiri akad-akad pembiayaan dimaksud dengan varian pembiayaan sebagai berikut :

a. .Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberi talangan dana untuk memenuhi pembayaran beaya perjalanan ibadah haji (BPIH), khususnya untuk mendapatkan porsi keberangkatan dan dana talangan tersebut biasanya sudah harus dikembalikan sebelum masa pelunasan BPIH

b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syari'ah, dimana nasabah diberikan keleluasaan untuk menggunakan kartu kredit tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[6] H. Supriyanto, "Manajemen Zakat" *Makalah* disampaikan pada workshop Manajemen Pengelolaan Zakat oleh Kanwil Depag DIY, Yogyakarta, tanggal 22 Mei 2006, , hal. 3

c. Sebagai pijaman kepada pengurus bank atau pengawai bank untuk cash bon, dimana pengembaliannya dilakukan secara cicilan melalui pemotongan gaji[7]

Adapun untuk jenis pembiayaan yang menggunakan dana yang berasal dari zakat, infaq dan ṣadaqah (ZIS) tidak semua bank syari'ah mengelola dan melakukannya sendiri, ada yang mengelola sendiri serta melakukan akad-akad untuk pentasarufanya, seperti BNI syari'ah, dan ada juga yang mendelegasikan pengelolaan dan pentasarufanya kepada lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk oleh bank syari'ah dimaksud, seperti Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) dan Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sebagaimana telah di paparkan di muka.

BNI Syari'ah merupakan bank yang mengelola sendiri semua dana al-qarḍ (modal bank dan dana ZIS) yang dalam penggunaannya dikelompokkan menjadi 2 bagian :

1. Hibah yaitu penggunaan dana al-qarḍ untuk kegiatan yang meliputi bea siswa pendidikan serta kegiatan-kegiatan fī sabīlillāh seperti hibah untuk rehabilitasi dan atau pembangunan tempat ibadah (masjid dan mushalla), hibah untuk rehab dan atau pembangunan rumah sakit, hibah untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan serta hibah untuk menopang kegiatan social lainnya seperti untuk bantuan kepada korban bencana alam khitanan masal dan lain sebagainnya. Pada akhir tahun 2003 secara keseluruhan dana hibah BNI Syari'ah yang mampu di berikan sejumlah

[7] Zulfikar, "Produk Pembiayaan Akad Tabarru' : Qardh" dikutip dari *http://www.bank-syariah-belajar-yuk.blogspot.com/2007/07/produk-pembiayaan.html*, tanggal 10 Juli 2007

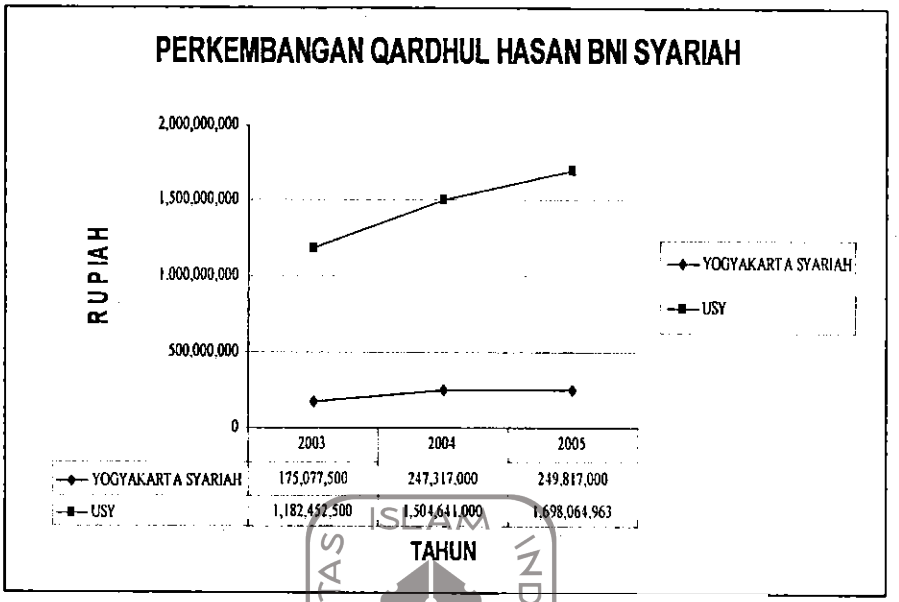
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Rp. 213.701.375,-, pada akhir tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 302.354.136,- atau naik 7,85 %, sedangkan pada akhir tahun 2005 telah menjadi Rp. 390.099.136,- atau naik 7,71 %[8]

2. Al-Qarḍul Ḥasan yaitu akad pembiayaan yang di berikan oleh bank syari'ah kepada nasabah baik untuk tambahan modal kerja ataupun untuk modal kerja awal. Pada laporan akhir tahun 2003 jumlah pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan oleh BNI Syari'ah yang dapat di salurkan kepada masyarakat sebesar Rp. 1.182.452.500,-, sedangkan pada laporan akhir tahun 2004 jumlah pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan BNI Syari'ah yang dapat di salurkan telah menjadi sebesar Rp. 1.504.641.000,- atau naik 27 %, begitu pula pada akhir tahun 2005 BNI Syari'ah mampu menyalurkan pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan sebesar Rp. 1.698.064.963,- atau naik 13 %. Dari total pembiayaan diatas, BNI Syari'ah kantor cabang Yogyakarta dapat menyalurkan pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan sebesar 16 % pada tahun 2004 dan menjadi sebesar 15 % pada tahun 2005, seperti yang nampak dalam gambar di bawah ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[8] Firdaus Furywardhana, "Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan, Study Kasus BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta" Tesis Magistes Studi Islam , Yogyakarta: UII, 2006, hal.70-80



Gambar. 3.1 Perkembangan al-Qardul Hasan

Sumber : Firdaus Furywardhana, Evaluasi NPL Pinjaman Qardul Hasan di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, Tesis MSI UII, 2006

Sementara itu LAZ BMM Umat sebagai lembaga yang secara khusus mengelola dana ZIS dari Bank Syari'ah Mandiri, menyampaikan laporannya bahwa hingga juni 2006 telah berhasil mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp. 18.32 milliar, dari dana itu sebesar Rp. 11.5 milliar diantaranya sudah di tasarufkan dengan alokasi sebagai berikut :

a. 75 % dari total dana ZIS yang terkumpul akan dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi umat, melalui program BSM Mitra Umat. dengan sasaran kaum fakir, miskin, garim, fī sabīlillāh dan hamba sahaya. Untuk tujuan dimaksud BSM Umat menempuh dua (2) metode
   1) Bantuan modal usaha (*Revolving Fund*) bagi perorangan setelah melalui suatu proses analisa dan persetujuan proposal

2) Syirkah Mustaḥiqīn. Dalam skim ini para penerima bantuan modal usaha kemudian bersama-sama membentuk satu unit usaha yang di kelola secara bersama-sama kemudia keuntungaya di bagi dengan sistim bagi hasil

b. 15 % dari total dana ZIS yang terkumpul akan dialokasikan untuk bantuan pendidikan, mulai dari tigkat SD sampai dengan mahasiswa lewat program BSM Didik Umat. Bahkan lewat program ini sedang di uji coba model Beadidik Wirausaha (*Student Enterpreuneur scholarship*) khusus bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi akan tetapi memiliki kemandirian dalam mengelola usaha untuk membiayai kuliahnya.

c. 10 % dari total dana ZIS yang terkumpul akan dialokasikan untuk memberikan bantuan yang sifatnya emergency dan yang bersifat karitas lewat program BSM Simpati Umat, misalnya untuk batuan becana alam.[9]

Senada dengan BSM Umat, Baitul Maal Muamalat (BMM) dari Bank Muamalat Indonesia juga telah menetapkan visi dan *blue print* lembaga yaitu "Menjadi Motor Penggerak Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan". *Blue print* tersebut pada gilirannya akan memagari dan mengarahkan BMM untuk senantiasa fokus pada aktivitas pemberdayaan usaha mikro, untuk itu BMM telah mengembangkan dua program unggulan :

---

[9] Dam, "LAZ BSM Umat Mengangkat Derajat Kaum Dhu'afa" dikutip dari http://www.republika.co.id/.../cetak_detail.asp? tanggal 25 Juli 2007

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Program *Community Development* yang berorientasi pada pemberdayaan usaha mikro

   Untuk menopang keberhasilan program ini, BMM menekankan kegiatannya untuk mendukung usaha-usaha mikro yang di kelola warga masyarakat agar dapat di serap oleh pasar, diantara usaha yang telah dilakukan oleh BMM untuk tujuan dimaksud adalah menerapkan *business linkage model* pada setiap usaha pemberdayaan usaha mikro

2. Program Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro

   Program ini khususnya ditujukan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yang di wujudkan melalui proyek peningkatan kemandirian ekonomi rakyat (P2KER) serta program dana bergulir syari'ah (DBS). Untuk mendukung program dimaksudkan BMM hingga akhir tahun 2005 tercatat telah menyalurkan dana perkuatan sebesar Rp. 53,5 milliar kepada 928 BMT di 16 Propinsi yang tersebar di 30 kota/kabupaten.[10]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Penggunaan al-Qarḍul Ḥasan oleh Penerima

Hingga akhir tahun 2005 jumlah pemohon bantuan al-Qarḍul Ḥasan di BNI syari'ah cabang Yogyakarta tercatat sejumlah 115 orang. Berdasarkan penelitian bank syariah lewat prinsip 2 P yaitu *purpose* dan *payment*, diketahui bahwa fasilitas pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan dimaksud sebagian besar di gunakan untuk tambahan modal kerja yakni, sebanyak 81 % atau 93

[10] Dikutip dari *http://www.baitulmaal.net/modules.php?* Tanggal 1 Agustus 2007

orang, dan 13 % atau 15 orang selebihnya mempergunakannya untuk kebutuhan investasi yaitu pembelian sarana dan atau prasana usaha, serta 6 % atau 7 orang sisanya adalah untuk keperluan lainya seperti beaya sekolah dan lain sebagainya,[11] secara singkat dapat diliahat pada gambar di bawah ini.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Gambar 3.2 Penggunaan Pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan

Sumber : Firdaus Furywardhana, Evaluasi NPL Pinjaman Qarḍul Ḥasan di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, Tesis MSI UII, 2006

E. Prosedur Pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan

Prosedur pembiayaan yang di berlakukan untuk pembiayaan produk al Qarḍul Ḥasan adalah sama dengan prosedur pembiayaan untuk produk-produk bank syari'ah lainnya. Pertama-tama calon penerima bantuan mengajukan

[11] Firdaus Furywardhana, "Evaluasi Non Performance Loan (NNPL) .....hal. 47

surat permohonan pembiayaan al-Qardhul Hasan kepada bank syari'ah atau lembaga pengelola ZIS, kemudian kepada calon penerima/pemohon pinjaman/pembiayaan dimaksud, sebelum menerima, oleh bank syari'ah akan dilakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5 C atau lebih dikenal dengan *five C's of Credit*, yaitu

1. *Caracter.*

   Bahwa pemberian pembiayaan itu di dasari oleh kepercayaan. Kepercayaan itu timbul karena pemohon memiliki karakter berupa, moral, watak ataupun sifat-sifat personality yang positif dan koperatif serta memiliki taggung jawab. Pemohon yang memiliki karakter baik adalah pemohon dengan tingkat kejujuran yang tinggi dan integritas yang tinggi pula untuk memenuhi segala kewajibannya.

2. *Capacity.*

   Hal ini meyangkut kemampuan pemohon untuk melunasi pembiayaan yang di terimanya. Peniliaian ini akan di lihat dari kemampuan jenis usahanya untuk mendatangkan penghasilan guna melunasi kreditnya. *Capacity* dapat di lihat dari dua aspek, *pertama* aspek keuangan. yakni dilihat dari cashflow yang dihasilkan usahnya. *Kedua* aspek hukum yakni akan di lihat bahwa pemohon itu memang memiliki kapasitas untuk melakukan perjanjian kredit dan melunasinya sesuai perjanjian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. *Capital.*

Yaitu analisa yang bertujuan mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri (*own share*). Semakin besar modal sendiri maka semakin tangguh menghadapi kemungkinan resiko yang akan muncul di kemudian hari.

4. *Collateral.*

Collateral. Merupakan jaminan yang diberikan oleh pemohon atas pembiayaan yang di terimanya. Jaminan ini diperlukan untuk menutup kemungkinan resiko terburuk yaitu tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diterimakan karena atau akibat apapun. Jaminan ini merupakan alat pengaman lapis kedua (*the second way out)* bagi bank dalam setiap pemberian pembiayaan. Semakin besar jaminan itu mengcover pembiayaan, maka semakin aman dana bank tersebut., jaminan-jaminan dimaksud akan dianggap aman apabila mampu mengcover 120 % dari total pembiayaannya.

5. *Condition of Economic*

Dimaksudkan dengan Condition of Economic adalah kondisi makro yang mempengaruhi pembiayaan dari perbankan, dan secara spesifik Condition of Economic berarti kondisi mikro yang mempengaruhi bisnis pemohon, apakah bisnis pemohon rentan dengan fluktuasi ekonomi atau relatif tangguh menghadapi gejolak perekonomian[12].

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[12] Taswan, *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik dan Aplikasi*, Cet. II (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2006), hal. 156-157

Prinsip 5 C diatas kadang-kadang masih ditambah dengan 2 C, yakni *Coverage af insurance* dan *Contraint,* disamping dilakukan penilain dengan prinsip 5 C, kepada calon penerima juga masih dilakukan penilaian dengan prinsip 5 P dalam kredit (*five P's of credit*) yang meliputi :

1- *Person* atau *people*. Adalah analisa yang mencakup antara lain; nama pemohon, domosili, bentuk usaha, jenis usaha, legalitas usaha dan lain sebagainya. Informasi mengenai identitas ini dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang penanggungjawab utama pengelola usaha, lokasi usaha serta keabsahan usaha.

2- *Purpose* adalah sebuah analisa tentang jumlah permohonan pembiayaan, objek yang dibiayai, jangka waktu pembiayaan, alasan kebutuhan pembiayaan. Informasi mengenai tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran bahwa pembiayaan tersebut benar-benar digunakan untuk membiayai suatu ussaha, bukan untuk hal-hal yang bersifat kosumtif atau spekulatif.

3- *Prospe*ct adalah menilai masa depan usaha dan perhitungan bank antara resiko dan pendapatan yang akan diperoleh dari pemberian pembiayaan

4- *Payment* merupakan penilaian oleh bank atas kemampuan penerima pembiayaan dalam membayar kembali pinjaman/pembiayaan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5- *Protection* yaitu analisa tentang kemungkinan gagal perlu ada jaminan sebagi benteng terakhir, perlindungan dan berbagai asuransi perlindungan bagi nasabah dan bank[13]

Namun untuk pembiayaan al-Qarḍul Hasan, kepada calon penerima bantuan pembiayaan tidak dilakukan penilaian dengan prinsip 5 C dan prinsip 5 P secara sempurna, karena penerima pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan merupakan pengusaha golongan ekonomi lemah yang terbatas modalnya, kurang ataupun tidak mempunyai pencatatan secara baik dalam pengelolaan financial maupun pengelolaan usahanya, omset penjualan rata-rata masih dibawah Rp. 2.000.000,- perbulan serta tidak pula mempunyai jaminan tanah maupun barang.

Sebagai jalan keluarnya kepada mereka hanya di terapkan penilaian 2 C dari prinsip 5 C yaitu *character* dan *collateral*, serta 2 P dari prinsip 5 P yaitu: *payment* dan *purpose*. **Character** merupakan sifat atau watak nasabah yang mengambil pembiayaan al-Qardhul Hasan. **Collateral** dalam terminologi pemberian kredit berarti jaminan yang di berikan nasabah kepada bank, namun dalam kasus pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan jaminan itu hanya berupa *Referensi*, yakni rekomendasi atau personal garansi dari pejabat atau seseorang kepada calon penerima pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan. **Payment** merupakan kemampuan nasabah al-Qarḍul Ḥasan dalam membayar kembali bantuan pembiayaan yang telah diterimanya. **Purpose**

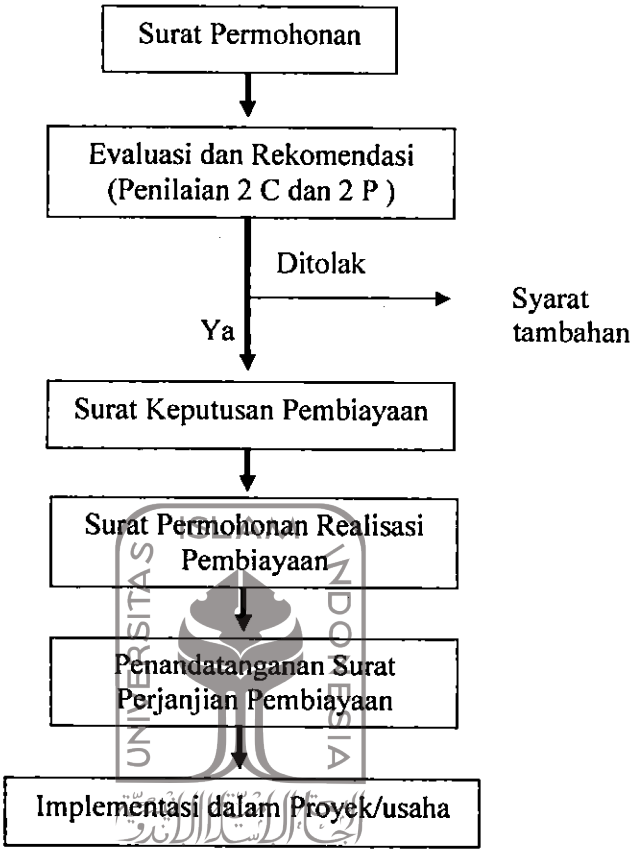
[13] Mudrajat Kuncoro dan Suhardjoo, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Cet I (Yogyakarta BPFE-Yogyakarta, 2002) hal.251

adalah tujuan nasabah al-Qarḍul Ḥasan mengambil bantuan pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan.[14]

Apabila calon penerima pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan telah lolos dari penilaian dengan prinsip 2 C dan 2 P diatas, maka akan di terbitkan Surat Keputusan Pembiayaan dari bank syari'ah, surat mana berisi persetujuan bank untuk memberikan bantuan pembiayaan beserta besarnya jumlah bantuan dari platfon yang diajukan. Setelah terbitnya surat diatas calon penerima pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan harus pula mengajukan surat permohonan realisasi pembiayaan setelah itu selesai kemudian prosesnya berlanjut kepada penandatanganan aqad atau perjanjian pembiayaan. Secara singkat prosedur pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan dapat di sederhanakan dalam gambar berikut

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[14] Firdaus Furywardana, "Evaluasi Non Performance Loan (NPL) ..... hal 27



Gambar. 3.3 Alur Pembiayaan al-Qardul Hasan

Sumber : Firdaus Furywardhana, Evaluasi NPL Pinjaman Qardul Hasan di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, Tesis MSI UII, 2006

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

F. Kelancaran Pengembalian Pembiayaan

Mendasarkan pada hasil penelitian tetang NPL di bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta Oleh Firdaus Furywardhana di dapatkan data-data sebagai berikut : bahwa dari tahun 2003 jumlah dana yang dapat di salurkan lewat al-Qardul Hasan mengalami kenaikan sebesar 27% pada akhir tahun 2004, serta mengalaml kenaikan lagi sebesar 13% pada akhir tahun 2005, namun

kenaikan jumlah pembiayaan tersebut ternyata juga diikuti oleh kenaikan jumlah tunggakan angsuran, hal itu dapat di lihat pada gamar dibawah ini.



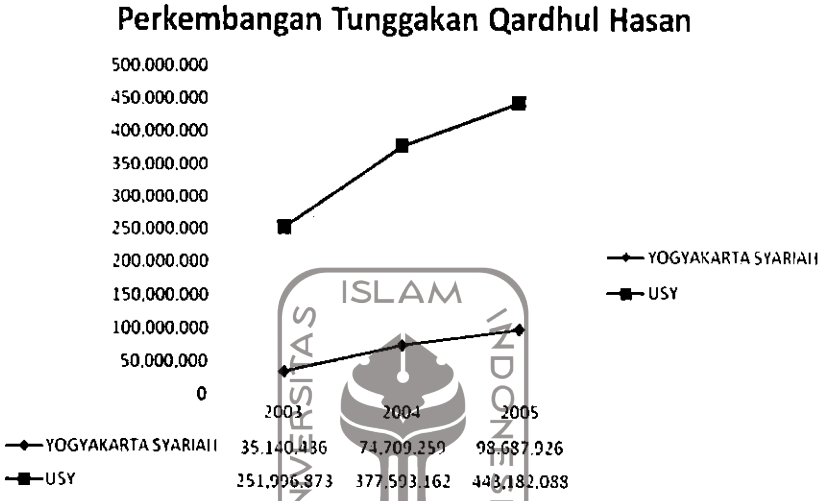
Gambar. 3.4 Jumlah Pembiayaan al-Qardul Hasan

Sumber: Firdaus Furywardhana, Evaluasi NPL Pinjaman Qarḍul Ḥasan di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, Tesis MSI UII, 2006

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Namun seiring dengan kenaikan jumlah pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan diatas, jumlah tunggakan pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan ternyata juga ikut mengalami peningkatan, dari Rp. 74.709.259,- (30%) pada akhir tahun 2004 menjadi Rp. 98.6870926,- (40%) dari total pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan BNI syari'ah. Dengan demikian total tunggakan pembiayaan al-Qardhul Hasan BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta adalah sebesar 20% terhadap total tunggakan pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan BNI Syari'ah pada akhir tahun 2004, dan

meningkat menjadi 22% pada akhir tahun 2005.[15] Kenaikan-kenaikan dimaksud dapat digambarkan seperti berikut :



Gambar 3.5 Tunggakan al-Qardul Hasan

Sumber: Firdaus Furywardhana, Evaluasi NPL Pinjaman Qardul Hasan di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, Tesis MSI UII, 2006

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Fenomena terjadinya tunggakan pembiayaan al-Qardul Hasan ternyata tidak hanya terjadi pada BNI Syari'ah saja, tetapi juga terjadi pada lembaga amil zakat lainya yang juga mengelola atau menyalurkan pembiayaan dengan skim al-Qardul Hasan, sebagaimana yang sampaikan oleh Direktur Laznas BSM Umat milik Bank Syari'ah Mandiri, Alamsani M.Hum, dimana beliau mengungkapkan, bahwa sejak berdirinya Laznas BSM Umat hingga hari ini sudah Rp 4 miliar dana yang telah diberikan untuk program Mitra Umat, Program ini merupakan bantuan permodalan bagi pengembangan usaha kecil

[15] *Ibid* ..... Hal 3 dan 6

melaui program al-Qarḍul Ḥasan. Namun diakuinya, dari dana sebesar itu, yang masih bergulir hanya sekitar 20 persen saja, artinya 80 persen binaan BSM akhirnya tidak mampu bertahan.[16]

Adapun penyebab terjadinya pembiayaan macet (NPL) sebagaimana dikemukanan Firdaus Furrywardhana dalam penelitiannya di atas, ternyata sebabnya sangat komplek, namun secara garis besar dapat di kelompokkan menjadi :

1. Faktor-faktor pada sisi nasabah.

   Uji statistik menunjukkan bahwa dari sisi nasabah ada empat (4) faktor yang menjadi penyebab NPL, yaitu, faktor karakter, faktor referensi (Collateral), faktor Purpose dan faktor Payment, kemudian uji korelasi atas keempat faktor tersebut diatas, selanjutnya membuktikan bahwa *faktor karakter* memiliki pengaruh yang lebih besar dari 3 faktor yang lain, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa faktor karakter adalah faktor penting dan utama dalam mengurangi resiko tidak berhasil dalam pemberian pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan.

   Berdasarkan rekomendasi petugas pemasaran kepada calon penerima sebelum pencairan al-Qardhul Hasan semuanya berkarakter baik, akan tetapi setelah pembiayaan di berikan, para penerima al-Qarḍul Ḥasan terdebut ternyata ada yang baik dan ada yang jelek. Hasil evaluasi terhadap penerimanya selanjutnya menunjukkan, bahwa 62% penerima al-Qarḍul Ḥasan BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta berkarakter jelek,

[16] "BSM Gelontorkan modal bagi 10 BMT di SUMUT" dikutip dari *http://www.republika.co.id/.../cetak_detail.asp?mid=5&* tanggal 3 Agustus 2007

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

karena tidak kompromi dalam penyelesaian pembiayaan, selanjutnya bahwa karakter jelek itu diantaranya terjadi karena tidak 100% pembiayaan yang diberikan itu digunakan untuk modal usaha atau pembelian sarana usaha.[17]

2. Faktor pada sisi bank.

Sebagaimana telah di singgung dimuka, meskipun pada akad pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui penerapan prinsip 5 C dan prinsip 5 P oleh bank, walauipun tidak sempurna yaitu dengan hanya menerapkan penilaian atas carakter dan collateral dari prinsip 5 C serta prinsip payment dan purpose dari prinsip 5 P, dengan harapan agar lebih sederhana. Namun dalam penelitianya Firdaus juga menemukan 3 hal dari pihak bank syari'ah yang memiliki andil besar terhadap besarnya NPL :

a. Penilaian faktor karakter yang di wujudkan dalam proses evaluasi dan rekomendasi sering kurang akurat. Evaluasi yang berikan petugas bank hanya berupa verifikasi data yang di isi oleh pemohon apakah sudah sesuai dengan keadaan berikut verifikasi lokasi dan kegaiatan pemohon.

b. Pengawasan yang di lakukan oleh bank juga sangat minim yang di indikasikan dengan pembuatan laporan al-Qarḍul Ḥasan untuk unit syari'ah dilakukan 3 (tiga) bulan sekali, demikian pula kartu

[17] Firdaus Furywardhana, "Evaluasi Non Performance Loan (NPL) ..... Hal. 43

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pengawasan pembiayaan al-Qardhul Hasan tidak pernah dibuat atapun diisi oleh petugas.

c. Tidak ada petugas yang khusus menangani pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan selama ini dirangkap atau di laksanakan oleh petugas pemasaran sebagai tugas tambahan. Hal ini terjadi karena Bank syari'ah khususnya BNI syari'ah masih menganggap produk al-Qarḍul Ḥasan sebagai produk sampingan sehingga pengelolaannya belum di lakukan secara propesional.[18]

3. Faktor eksternal

Yaitu paradigma masyarakat yang masih mengganggap bahwa pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan merupakan produk social yang bersifat bantuan, sehingga pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan tidak wajib di kembalikan sebagaimana bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Walaupun pada saat akad di laksanakan telah di jelaskan bahwa pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan yang telah di terima, wajib dikembalikan sebesar pokok pinjaman karena pengembaia itu akan di gulirkan kembali kepada pemohon lainya, namun persepsi masyarakat bahwa al-Qarḍul Ḥasan seperti bantuan dari pemerintah masih sangat kuat.[19]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[18] *Ibid.* hal.57-58
[19] *Ibid.* hal. 59

BAB IV

ANALISA

A. Pengembangan Keunggulan Kompetitif al-Qarḍul Ḥasan

Membicarakan pelaksanaan dan kemudian mencari kemungkinan pengembanganya lebih lanjut dari al-Qarḍul Ḥasan, sesungguhnya kita sedang membicarakan tentang pola distribusi atau pentasarufan dana ZIS, yang secara umum mencakup 2 pola yang menonjol yaitu pola distribusi konsumtif dan pola distribusi produktif. Dalam pola distribusi produktif terdapat tiga (3) bentuk ***pertama: Surplus Zakat Budged*** ; yaitu pengumpulan zakat, kemudian dalam pendistribusiannya hanya sebagian dari zakat itu yang dibagikan sementara sisanya digunakan untuk proyek-proyek produktif. ***kedua: In Kind*** adalah motode penyerahan dana zakat dalam bentuk alat-alat produksi yang sangat di butuhkan oleh 8 asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat, dan ***ketiga: Revolving Fund.*** Adalah sistim pengelolaan zakat, dengan memposisikan dana zakat sebagai dana pinjaman yang wajib dikembalikan oleh penerimaya baik ada atau tidak ada bagi hasil.[1]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Wujud dari bentuk *Revolving Fund* diatas adalah pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan yaitu suatu bentuk pembiayaan yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (*return/bagi hasil*) dari pokok pembiayaan. Namun jika penerima pembiayaan tidak mampu mengembalikan pokok pembiayaan, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa ia tidak dapat dituntut atas

---

[1] Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* Cet. III (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 118-119

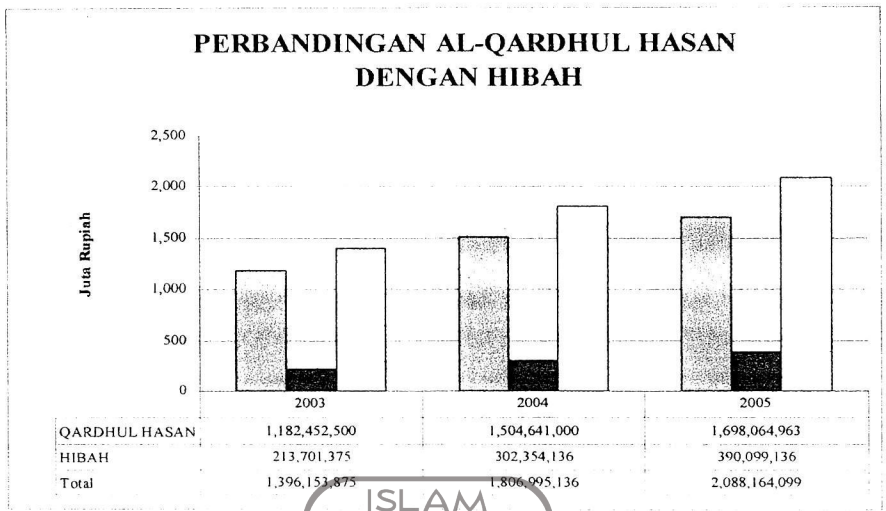
ketidakmampuannya itu, karena pada dasarnya dana itu adalah hak mereka, sedangkan jika ia mampu mengembalikan sebagian atau sepenuhnya, maka dana itu akan digulirkan kembali kepada mustaḥiq yang lain.

Selanjutnya dari reduksi data tentang aplikasi al-Qarḍul Ḥasan dalam sistim perbankan syari'ah, khususya di BNI syari'ah cabang Yogyakarta berdasarkan pada hasil penelitian dari Firdaus Furywardhana[2], dapat penulis kemukakan beberapa hal penting yang memilki makna bila dikaitkan dengan pokok masalah yaitu upaya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif al-Qarḍul Ḥasan, diantaranya :

1. Dari dua (2) pos alokasi penggunaan dana al-Qarḍul Ḥasan oleh BNI Syari'ah, yaitu untuk hibah dan pembiayaan untuk usaha, ternyata sebagian besar dana dialokasikan untuk pemberdayaan usaha mikro dengan fokus utama golongan ***"Fakir-Miskin"*** , perbandingan alokasi dua pos tersebut dapat di lihat pada gambar berikut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[2] Firdaus Furywardhana, "Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan, Study Kasus BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta" Tesis Magistes Studi Islam , Yogyakarta: UII, 2006, hal.2004



Gambar. 4.1 Perbandingan al-Qardhul Hasan dan Hibah

Sumber : Firdaus Furywardhana, Evaluasi NPL Pinjaman Qarḍul Ḥasan di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, Tesis MSI UII, 2006

Sebagai tambahan dan perbandingan, bahwa penggunaan dana dari ZIS untuk pemberdayaan usaha mikro ternyata juga di lakukan oleh hampir semua Lembaga Amil Zakat (LAZ) no perbankan sebagaimana di singgung dalam bab sebelumnya, misalnya LAZ BMM yang telah menetapkan *Tagline* "Indonesia Micro Enterprise Mediator" sebagai langkah kongkrit usaha pemberdayaan usaha mikro tersebut. Pemberdayaan usaha mikro sesungguhnya adalah langkah strategis dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan yang sebagian besar masih menjadi pakaian umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Ada 3 alasan yang mendasarinya; *pertama*, dari 39.72 juta unit usaha yang ada di Indonesia, 38,29 juta (98%) adalah usaha mikro, *kedua*; memberdayakan usaha mikro sangat strategis dalam mewujudkan *development throught equity*, *ketiga*;

usaha mikro hanya membutuhkan pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga menjadikannya lebih mudah untuk di berdayakan.[3]

2. Fungsi bank syari'ah sebagai amil zakat disamping sebagai lembaga keuangan, ternyata belum di pahami atau dikenal luas oleh masyarakat. Hal ini dapat lihat dari kecilnya jumlah penerimaan dana ZIS yang di peroleh Bank syari'ah dalam hal ini BNI syari'ah cabang Yogyakarta, bila dibandingkan dengan besarnya dana ZIS yang dapat di raih oleh LAZ. Sebagai gambaran dapat di simak perbandinganya pada tebel dibawah[4] :

Tabel. 4.2 Perbandingan Perolehan ZIS

No	Nama Lembaga	Jumlah Perolehan ZIS Pertahun		
		2003	2004	2005
01.	BNI Syari'ah	1.396.153.875	1.806.995.136	2.088.164.136
02	LAZ Rumah Zakat Indonesia	3.803.671.937	6.562.302.177	23.041.240.535

Sumber: diolah berdasarkan Firdaus Furywardhana, Evaluasi NPL Pinjaman Qarḍul Ḥasan di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, Tesis MSI UII, 2006 dan Laporan Penerimaan dan Penyaluran, Rumah Zakat Indonesia Januari-Desember 2005

3. Prosentase *Non Performance Loan* (NPL) al-Qarḍul Ḥasan tergolong tinggi. Dalam anlisa Firdaus Furywardhana minimal ada tiga (3) faktor yang mempengaruhi tingginya prosentase NPL tersebut ; *pertama*, faktor dari nasabah yang meliputi buruknya karakter dan kelemahan bidang

[3] "Kompetensi dan positioning BMM" dikutip dari *http//www.baitulmaal.net/modules.php* tanggal 24 mei 2007

[4] "Laporan Penerimaan dan Penyaluran Januari- Desember 2005 Rumah Zakat Indonesia", *Buletin Rumah Lentera Hangatkan Rasa Nyalakan Cita*, Edisi III/Mei 2006, hal. 10

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

administrasi serta manajemen usaha, *kedua*, faktor dari bank yakni tidak adanya pendampingan usaha serta tidak ada tenaga khusus untuk pelayanan paripurna produk al-Qarḍul Ḥasan karena bank masih menganggap produk dimaksud sebagai produk sampingan. *ketiga*, faktor eksternal yaitu anggapan masyarakat luas bahwa pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan adalah bersifat bantuan tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikannya

4. Ada beberapa keunggulan yang di miliki oleh Perusahaan Modal Ventura, yang kemungkinan bisa diadopsi oleh al-Qarḍul Ḥasan diantaranya :
   a. PMV Bersedia memberikan bantuan pembiayaan pada semua tingkatan pertumbuhan suatu usaha, mulai dari tahap ide sampai dengan tahap penurunan
   b. PMV Bersifat aktif, artinya disamping memberikan bantuan fiansial PMV ikut pula terlibat secara langsung dalam hal-hal yang akan ikut menentukan keberhasilan usaha PPU, misalnya bidang manajemen, pemasaran dan pengawasan
   c. Bantuan PMV Berjangka panjang, bahwa keterlibatnnya dengan PPU itu berkisar antara 3-6 tahun dengan harapan dalam masa itu PPU sudah dapat mencapai tingkat peetumbuhan yang di inginkan.
   d. Divestasi PMV terhadap PPU dapat dilakukan dengan berbagai varian

Pemikiran kearah pengembangan keunggulan kompetitif al-Qarḍul Ḥasan sesungguhnya berangkat dari asumsi bahwa suatu organisasi dalam hal ini bank syari'ah secara umum, haruslah selalu mengembangkan strategi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pengembangan produk baru yang lebih efektif, produk yang sudah ada saat ini menghadapi rentang hidup yang terbatas dan harus diganti dengan produk yang lebih baru. Proses pengembangan produk baru secara umum terdiri dari 8 tahap secara berurutan, dimulai dari *menggali gagasan*, dilanjutkan kepada *penyaringan gagasan* dan seterusnya *pengembangan konsep dan pengujian.* Konsep yang kuat kemudian akan di lanjutkan kepada *pengembangan strategi pemasaran* dan *analisis bisnis*, yang merupakan tahap akhir konseptual. Gagasan atau konsep akhir tersebut kemudian di wujudkan dalam *pengembangan produk, uji pemasaran* dan terakhir tahap *komersialisasi.*[5]

Dalam rangka pengembangan produk suatu bank, secara umum hendaknya di pahami terlebih dahulu tentang daur hidup suatu produk bank yang akan di kembangkan. Ada lima (5) tahapan dalam daur hidup suatu produk bank :

1. Tahap Pengembangan Produk

   Tahap ini dimulai ketika bank menemukan dan mengembangkan suatu gagasan produk baru. Selama masa ini angka penjualan nilainya nol tetapi biaya investasi sangat besar.

2. Tahap Pengenalan

   Tahap ini merupakan pertama kali produk bank di perkenalkan kepada masyarakat. Tahap ini di tandai dengan pertumbuhan penjualan yang rendah karena belum banyak di kenal oleh masyarakat dan juga biaya operasional yang tinggi. Pada tahap ini bank juga banyak menghadapi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5] Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, alih bahasa Alexander Sindro, Jilid I, (Jakarta : Prenhallindo, 1997), hal. 319

kendala, karena kurangnya tenaga terampil untuk memasarkan, serta teknik pemasaran yang masih uji coba.

3. Tahap Pertumbuhan

Apabila dalam tahap pengenalan berhasil maka disatu pihak hasil penjualan akan naik dan produk mulai berkembang, namun pada pihak lain pesaing mulai masuk pasar karena tertarik dengan peluang yang ada dengan memeperkenalkan produk yang serupa. Dalam tahap ini yang harus dilakukan adalah berusaha meningkatkan pelayanan, berusaha mencari pasar sasaran baru, menampilkan ciri dan kemasan baru dan yang sejenisnya

4. Tahap Kedewasaan

Pada tahap ini produk telah di terima oleh masyarakat, oleh karena itu agar nasabah dapat dipertahankan, bank harus mejaga kualitas pelayanan. Tahap ini biasanya berlangsung lebih lama dan penuh tantangan bagi bank. Strategi yang dapat di kembangkan adalah modifikasi pasar, modifikasi produk dan modifikasi sistem pemasaran

5. Tahap Penurunan

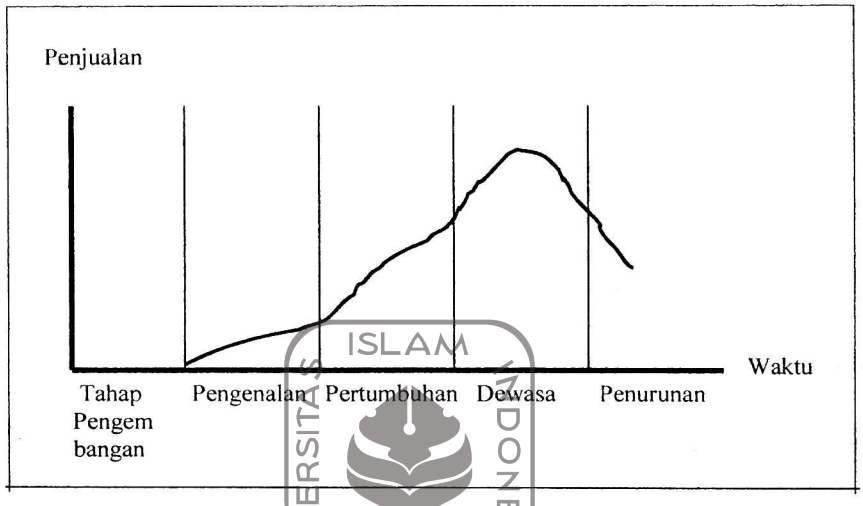
Tahap ini ditandai dengan menurunnya penjualan produk karena pasar semakin jenuh. Strategi yang dapat dilakukan oleh bank adalah melakukan evaluasi terhadap produk yang paling lemah, membangkitkan kembali produk yang lemah akan tetapi masih memiliki prospek dengan melakukan modifikasi dangan penerapan teknologi.[6]

---

[6] *Ibid.* hal. 325

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tahapan-tahapan dari daur hidup produk bank tersebut dapat disederhanakan dalam bentuk gambar di bawah ini.



Gambar 4.3 Daur Hidup Produk Bank

Sumber : Philip Kotler dan Gary Armstrong, Dasar-Dasar Pemasaran

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mendasarkan pada lima kategori diatas, maka produk al-Qardul Hasan dari bank syari'ah dapat di kategorikan telah memasuki tahap dewasa, dengan landasan bahwa secara umum produk diatas sesungguhnya telah di kenal dan di terima oleh masyarakat, khususnya yang dilaksanakan oleh LAZ non perbankan. Juga dapat dilihat dari rentang waktu produk itu mula pertama diluncurkan yakni pada tahun 1992 dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syari'ah pertama di Indonesia, kemudian produk itu tumbuh dan berkembang seiring dengan munculnya bank-bank syari'ah baru hingga awal tahun 2000an. Persoalan pelaksanaanya oleh bank syari'ah yang masih belum optimal adalah bisa karena dipengaruhi oleh

persoalan intern lembaga bank syarī'ah itu sendiri, misalnya karena kecilnya dana ZIS yang tersedia, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan lain-lain.

Walau demikian bank-bank syarī'ah ternyata tetap berkomitmen untuk melaksanakan al-Qarḍul Ḥasan, sehingga dengan mengingat nilai lebih bank syari'ah dibandingkan dengan LAZ non perbankan, yakni posisi bank syari'ah sebagai entitas lembaga keuangan yang *profit oriented* tetapi sekaligus juga mengemban misi sosial sebagai LAZ, maka untuk menjaga agar produk tersebut dapat berjalan secara optimal kiranya dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga langkah berikut:

a. Memodifikasi pasar, dimana bank berusaha meningkatkan penggunaan produk oleh konsumen dengan mencari konsumen dan segmen pasar yang baru.
b. Memodifikasi Produk, yaitu bank mengubah karakteristik produk untuk menarik konsumen baru dan mengapresiasikan penggunaan yang lebih banyak.
c. Memodifikasi bauran pasar, yakni bank dapat mencoba memperbaiki penjualan dengan cara mengubah satu atau beberapa elemen dari bauran pemasaran, misalnya dengan menurunkan harga untuk menarik lebih banyak konsumen baik konsumen baru atau dari konsumen pesaing.[7]

Selanjutnya mengingat karakteristik produk al-Qarḍul Ḥasan sebagai produk yang masuk dalam kategori akad tabarru' yang secara prinsip tidak

[7] *Ibid.* Hal. 329

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bisa di ubah menjadi akad tijarah, maka dari ketiga alternatif pengembangan diatas kiranya hanya ada dua yang memiliki kemungkinan untuk diterapkan pada produk al-Qarḍul Ḥasan, yaitu :

a. *Memodifikasi pasar*

b. *Memodifikasi produk.*

Kemudian untuk memudahkan pembahasan dan memfokuskan analisa dari dua alternatif dimaksud, akan di pergunakan analisa tentang kekuatan, kelamahan, peluang dan tantangan (analisa SWOT) atas data-data pelaksanaan al-Qarḍul Ḥasan yang telah di dapatkan.

Adapun untuk lebih memudahkan dalam menggunakan analisa SWOT, maka problem dari masing-masing unsur SWOT akan di kelompokkan dan akan di masukkan kedalam matrik SWOT, sehingga dari matrik SWOT tersebut nantinya akan diperoleh empat (4) kelompok alternatif pilihan strategi, yang disebut dengan : *1. Strategi SO*, yaitu menggunakan segala kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada, *2. Strategi WO*, yaitu mengatasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang, *3. Strategi ST*, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindar dari ancaman dan *4. Strategi WT*, yakni menekan semua kelemahan dan mencegah semua ancaman. Penerapan analisa matrik SWOT tersebut dalam operasionalnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel: 4.4 Analisa SWOT al-Qardul Ḥasan

	Streghts (S)	*Weakness (W)*
	1.Sistem dan prosedur pembiayaan sederhana 2.Sumber dana dari ZIS yang potensinya sangat besar 3.Pembiayaan dilakukan dengan sistem *Revolving Fund.* 4.Perkembangan jumlah bank syari'ah yang ditandai dengan banyak kantor cabang dan unit usaha syariah 5.Menjadi produk pembeda antara bank syari'ah dengan bank konvensional	1.Dana masih terbatas 2.Tingginya tingkat NPL karena kurangnya pengawasan akibat SDM pengelola dan penerima pembiayaan lemah 3.Pembiayaan masih terfokus untuk asnaf fakir miskin 4.Bank Syari'ah sebagai amil zakat belum tersosialisasi 5.Penggunaan dana masih terbatas untuk modal usaha awal atau untuk tambahan modal usaha serta belum menyentuh kebutuhan psikologis
Opportunities (O) 1.Potensi dana ZIS yang besar belum tergarap secara optimal 2.Semua Asnaf 8 secara umum berhak atas dana ZIS 3.Meningkatnya *syari'ah banking minded* seiring dengan meningkatnya kesadaran keagamaan masyarakat 4.Inovasi pengembangan varian manfaat baru QH sangat terbuka melalui pintu ijtihad	**Strategi SO** 1.Mobilisasi dana ZIS lewat jaringan yang ada 2.Meningkatkan kwalitas pelayanan al-Qardul Ḥasan dengan menetapkan seorang atau lebih, yang secara khusus menangani operasionalnya	**Strategi WO** 1.Memperluas pangsa pasar kepada asnaf/ golongan (8) delapan dengan melakukan reintepretasi atas beberapa golongan misalnya *gharim* dan *Ibn Sabil* 2.Melakukan inovasi pengembangan varian kegunaan produk QH 3.Melakukan pengawasan secara intens agar pembiayaan QH dapat lebih berdayaguna serta berhasilguna
Threats (T) 1.LAZ yang mengelola al-Qardhul Hasan sangat agresif dalam pengumpulan ZIS serta inovatif dalam pendistribusiannya	**Strategi ST** 1.Tetap fokus kepada produk spesifik dengan mengembangkan nilai lebihnya untuk tetap dapat bersaing	**Strategi WT** 1.Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan SDM pengelola dan penerima al-Qardhul Hasan

Sumber : Diolah berdasarkan Taswan, Manajemen Pemasaran Bank

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan demikian, maka dari matrik tersebut di dapatkan tiga alternatif jawaban yang memungkinkan untuk dapat meningkatkan keunggulan kompetitif al-Qarḍul Ḥasan:

1. Memperluas Pangsa Pasar

   Yaitu kepada delapan (8) asnaf / golongan secara keseluruhan, hal ini sebagai jawaban atas persoalan bahwa yang dapat menikmati pembiayaan al-Qardhul Hasan selama ini hanyalah golongan fakir-miskin dan sabilillah sekaligus untuk menjawab masalah penggunaan pembiayaan yang masih terbatas hanya untuk modal awal atau pengembangan usaha dan untuk pendukung kegiatan sosial atau keagamaan dari penerima bantuan pembiayaan.

2. Melakukan Inovasi Pengembangan Varian Manfaat al-Qarḍul Ḥasan

   Yaitu dengan menjadikan pengembalian pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan sebagai ***Modal Investasi***. Inovasi varian manfaat ini diperlukan khususnya untuk menutup kekurangan bahwa manfaat pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan dirasakan belum mampu menyentuh kebutuhan psikologis penerimanya. Untuk itu, maka dana dari pengembalian pokok pembiayaan baik setengahnya, dimana yang setengahnya telah digulirkan kembali kepada mustaḥik lainnya, ataupun secara penuh, akan dijadikan modal dan akan diinvestasikan kembali oleh bank pada usaha-usaha yang produktif. Hasil dari investasi tersebut kemudian akan di kembalikan lagi kepada penerima pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan dimaksud, misalnya dalam wujud jaminan atau bantuan dana perawatan kesehatan, yang dapat digunakan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sewaktu-waktu jika penerima pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan sedang dalam perawatan dokter.

3. Menjadikan pengawasan dalam arti peran aktif bank syari'ah dalam pelatihan dan pendampingan kepada penerima pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelayanan produk al-Qarḍul Ḥasan. Pengawasan ini penulis anggap *sangat sangat penting* agar tujuan pendistribusian zakat secara produktif tercapai yaitu untuk pemerataan pendapatan yang akhirnya akan dapat mengeluarkan atau menjadikan golongan *mustakhik* menjadi golongan *muzakki* pada tahun-tahun berikutnya, serta untuk mencegah terjadinya ketergantungan antara pola dan tingkah laku konsumtif mustakhik dengan penditribusian dana ZIS.

Namun sebelum ketiga alternatif diatas ditetapkan sebagai tambahan keunggulan kompetitif al-Qarḍul Ḥasan, maka ketiga-tiganya harus mendapatkan rekomendasi dari syari'ah terlebih dahulu, maka kajian syari'ahnya akan dimulai dengan *side back* kepada pengertian zakat. Terdapat beberapa pengertian tentang zakat :

a. Abdur Rahman al-Jazirī menyatakan zakat adalah :

تمليك مالٍ مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة

" Pemilikan khusus bagi nereka yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat yang khusus"[8]

[8] Abdur Rahman al-Jaziriī, *al-Fiqh Alā al-Maẓāhib al-Arba'ah*, Juz I (Kairo : Dār al-Ḥadīs, tt), hal. 456

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Menurut asy-Syaukani

إعطاء جزءٍ من النّصاب إلي فقيرونحوه غير متّصف بمانع شرعي يمنع من التصرف

"Pemberian sebagian dari harta yang telah sampai kepada niṣāb kepada orang fakir dan yang lainya yang tidak di larang oleh agama" [9]

c. Yusuf al-Qarḍawi mendefinisikan zakat adalah bagian tertentu dari harta yang di wajibkan oleh Allah SWT untuk mereka yang berhak menerimanya.[10]

Secara prinsip zakat harus di berikan kepada delapan asnaf (golongan) sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah (9):60

إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وإبن السّبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

"Sesungguhnya Zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatiya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu keketatapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[11]

Dalam memahami ayat ini ada beberapa permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama diantaranya:

---

[9] Muhammad ibn Alī ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Auṭār*, Juz IV (Kairo : Maktabah Dār at-Turāṣ, tt), hal. 114

[10] Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Falsafah Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis*, alih bahasa Salman Harun Dkk, Cet.X (Bogor: Pustaka Citra Antar Nusa, 2007), hal. 34

[11] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahya* (Semarang: Thaha Putra, 1995), hal. 288

1. Siapakah diantara 8 golongan diatas yang paling berhak menerimanya.

Perbedaan mereka berawal dari perbedaan pandangan dalam memahmi huruf (*lii*) لـي dalam firman Allah ..... إنّـما الـصـد قـات للفقـراء diatas. Pengarang Tafsir *al-Waḍīḥ* mengatakan, "Sesungguhnya rahasia yang ditunjukkan dari huruf ل adalah menunjukkan kepemilikan bagi golongan yang khusus" yaitu fakīr, miskīn, pegawai zakat, mu'allaf, orang yang banyak berhutang dan ibn sabīl, sedangkan huruf في menunjukkan sifat atau kepentingan umum dari umat Islam dan itu hanya terdapat pada hamba sahaya dan sabīlillah.[12] Sedangkan as-Zamakhsyari menyatakan bahwa di gantinya huruf ل dengan huruf في pada 4 golongan terakhir, adalah sebagai indikasi bahwa merekalah yang paling berhak terhadap hasil zakat. karena huruf في merupakan huruf yang menunjuk kepada tempat, sehingga mengingatkan bahwa merekalah sesungguhnya yang paling berhak terhadap harta zakat itu.[13]

Dari dua kutub tersebut penulis sepakat atas ulasan Abdul Hamid Mahmud, bahwa sesungguhnya *dari segi arti* tidak ada perbedaan yang prinsipil dari para fuqaha atas ayat dimaksud. Kepemilikan empat golongan pertama yang dimulai dengan huruf ل yaitu fakīr, miskīn,

---

[12] Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, alih bahasa Muhammad Abqory Abdullah Karim, Cet. I (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hal 73

[13] as-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kassaf* , Juz. II (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, tt) hal. 274

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pegawai zakat dan mu'alaf adalah kepemilikan secara penuh, dimana mereka bebas menggunakan harta tersebut seperti pemilik aslinya yaitu muzaki, sedangkan empat golongan selanjutnya yang diawali dengan huruf في yaitu : hamba sahaya, orang yang berhutang, sabīlillah dan ibn sabīl, hanya memiliki kepemilikan tidak penuh, terikat dengan ketentuan agama dalam manfaat pemberian harta zakat kepada mereka.[14]

2. Apakah zakat harus dibagikan kepada masing-masing golongan

Menurut ulama mazhab Syafi'iyah, wajib mengalakasikan zakat wajib, baik zakat maal atau zakat fitrah kepada 8 golongan diatas, sebagai pengamalan atas firman Allah dalam QS at-Tauibah (9) : 60. dimana ayat tersebut menyandarkan segala macam bentuk zakat kepada 8 golongan diatas dengan menggunakan huruf ل yang berarti *milik* (لام التّمليك) serta mengikat mereka dengan huruf و yang berarti *bersama-sama* (واو التّشريك) yang hal itu menunjukkan bahwa semua harta zakat adalah milik mereka secara bersama-sama. Oleh karena itu sebaiknya harta zakat itu bila memungkinkan harus dibagikan kepada 8 golongan tersebut tanpa kecuali, akan tetapi apabila hal itu tidak memungkinkan, maka harta zakat dapat di bagikan kepada golongan yang ada dari 8 golongan

[14] Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat,* ……, hal. 77

dimaksud dengan catatan paling sedikit dibagikan kepada 3 golongan, mengingat kriteria jama' itu sedikitnya adalah 3.[15]

Sedangkan menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah) harta zakat itu dapat diberikan kepada satu golongan saja dari 8 golongan tersebut., bahkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan membagi harta zakat itu kepada perseorangan yang masuk dalam kategori 8 golongan penerima zakat, sedangkan ulama Hambaliyah menekankan perlunya membagi harta zakat kepada salah satu golongan yang sekiranya paling membutuhkan.

Dasar yang di gunakan oleh jumhur ulama adalah karena firman Allah dalam QS at-Taubah (9) : 60 tersebut menetapkan bahwa harta zakat itu tidak boleh dibagikan kepada selain 8 golongan dimaksud, bukannya menetapkan kewajiban kepada 8 golongan itu. Sebagaimana yang di katakan oleh ibn Qudamah bahwa penggunaan kata إنما dalam firman Allah diatas adalah sebagai pembatas dan ketatapan harus sesuai dengan yang disebut serta melarang kepada selain yang di sebut[16] Hal ini memberikan pengertian bahwa penyebutan 8 golongan penerima zakat tersebut mengindikasikan adaya kebolehan untuk memilih kepada golongan mana harta zakat itu akan diberikan bukannya keharusan membagi kepada semuanya.[17]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[15] Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adilatuhu*, Juz. V. Cet. 4. (Kairo : Dār al- Fikr, 2004), hal. 1950

[16] Imām al-Alāmah Ibn Qudamah, *al-Mugnī*, ...hal. 689

[17] Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī* .....hal. 1951

3. Berapakah bagian dari masing-masing golongan

Untuk pegawai zakat ulama sepakat bahwa bagian mereka adalah sesuai dengan ukuran gaji atau sesuai dengan jerih payahnya[18], sementara untuk fakīr dan miskīn kembali para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah menyatakan bahwa kepada golongan fakir dan miskin diberikan harta sehingga tercukupi kebutuhan mereka, jika mereka mampu berusaha diberikan sehingga mereka mampu bekerja dengan harta itu, seandainya pedagang diberikan modal untuk berdagang walau dengan jumlah yang besar, karena Allah menetapkan zakat kepada mereka itu untuk menutup kebutuhannya dan memperbaiki kodisinya. Abu Hanifah dan Malik menyatakan bahwa bagian mereka adalah diperkirakan sejumlah nisab zakat yaitu 200 dirham, mengingat ayat tentang zakat tidak memuat batasan bagian dari masing-masing golongan[19].

Menurut Ibn Qudāmah, bahwa setiap golongan yang berhak mendapatkan harta zakat diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka yang mempunyai hutang diberikan uang sebanyak utang tersebut untuk melunasinya dan sekiranya lebih juga tidak masalah. Orang yang dalam perjalanan diberikan uang sebanyak biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan kembali ketanah airnya. Pegawai zakat diberi sesuai dengan ukuran gaji.[20]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[18] *Ibid.* hal 1960
[19] *Ibid.* hal. 1959
[20] Imām al-Alāmah Ibn Qudamah, *al-Mugnī*, ...hal 703

Dari beberapa pandangan diatas dapat di ambil dua (2) point yang memiliki kaitan erat dengan pokok masalah, diantaranya:

a. Seyogyanya dana ZIS itu di alokasikan kepada 8 golongan yang berhak tanpa kecuali, namun dapat juga dialokasikan kepada golongan yang ada jika keberadaan 8 golongan itu tidak penuh
b. Tidak ada ketatapan yang pasti dari naṣ tentang besarnya alokasi untuk masing-masing golongan, sehingga terbuka ruang yang lebar untuk melakukan inovasi atau ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah di gariskan syara', baik terhadap jumlah yang harus diberikan atau bentuk pemberian kepada 8 golongan yang berhak

Prinsip-prinsip dari hasil kajian syari'ah diatas selanjutnya akan di terapkan kepada alternatif-alternatif pegembangan yang telah di dapatkan dari analisa SWOT, yang akan di mulai dari :

1) Analisa Perluasan Pangsa Pasar

Dalam rangka perluasan pangsa pasar kepada 8 golongan secara keseluruhan, maka langkah strategis yang mesti dilakukan adalah melakukan *re-intepretasi* terleih dahulu kepada 8 golongan dimaksud, lebih-lebih setelah adanya bank syari'ah sebagai *intermediary system* dari lembaga amil zakat, langkah itu diperlukan agar alokasi dana ZIS lebih mutakhir, strategis, dan lebih mengena pada sasaran maslaḥat setiap golongan. Namun dari 5 golongan yang tersisa dan berhak atas dana ZIS, dengan mengingat kemungkinannya untuk dilakukan *re-intepretasi* serta adanya *prinsip revolving fund* dari al-Qarḍul Ḥasan, maka hanya ada 2 golongan saja yang kiranya memungkinkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yaitu: golongan orang yang banyak berhutang (*Garīm*) dan orang yang dalam perjalanan (*Ibn Sabīl*)

a) Garīm (orang yang banyak berhutang)

Garīm secara bahasa adalah tetap, dengan makna ini maka hutang itu bersifat tetap, kemudian disebut garīm karena tetapnya hutang itu kepadanya. Menurut Madhab Hanafi, garīm adalah orang yang mempunyai hutang sedangkan aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk menutup hutangnya tersebut.[21] Sementara Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa yang termasuk golongan garīm adalah orang atau kelompok orang yang terkena bencana dan musibah, sehingga mutlak adanya kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya[22]

Dari beberapa pengertian diatas, dalam penerapanya mungkin akan mengalami kesulitan karena pengertian kondisi garīm sangat lekat dan terkait dengan kondisi fakir atau miskin, sedangkan untuk kelompok tersebut sudah ada bagiannya tersendiri. Selanjutnya pada umumnya orang berhutang itu adalah untuk kepentingan konsumtif yaitu menutup kebutuhan hidup sehari-hari atau kepentingan produktif yakni untuk menjalankan usaha, oleh karenanya penulis akan menggunakannya dalam pengertian produktif sekaligus berkait erat dengan kebutuhan konsumtif.

Adapun untuk mengalokasikan dana ZIS kepada kelompok garīm hendaknya di perhatikan beberapa hal berikut ini :

---

[21] Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī* .....hal. 1957
[22] Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*..... *hal.* 595

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(1) Adanya kebutuhan kepada materi yang mendesak untuk membayar hutang. Daam hal ini ada empat kemungkinan, *pertama*; tidak memiliki harta sama sekali, *kedua*; punya harta akan tetapi tidak mencukupi, *ketiga*; memiliki harta akan tetapi ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, *keempat*; memiliki harta akan tetapi tidak berniat membayarnya. Dari empat kelompok ini tentunya dana zakat secara umum hanya sah diberikan kepada kelompok satu (1) sampai dengan tiga (3) saja. Kemudian kaitannya dengan pemberian pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan maka ia hanya dapat diberikan kepada kelompok kedua dan ketiga, adapun kelompok pertama cenderung masuk dalam kategori fakir-miskin bukan garīm sebagaimana yang sering di pahami orang..

(2) Motivasi untuk berhutang adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan dalam menjalankan agama bukan untuk kemaksiatan dan kemungkaran.

(3) Hutang itu di lunasi secara langsung bukan hutang yang memiliki tenggang waktu dimana dalam kategori tenggang waktu ini diperselisihkan ulama

(4) Tidak berlaku atas hutang yang muncul karena kafarat karena hal itu termasuk hutang kepada Allah.[23]

Mengingat beberapa batasan diatas maka aplikasi al-Qarḍul Ḥasan untuk kelompok garīm dapat dilakukan kepada orang-orang yang memiliki

[23] *Ibid.* hal. 596-598

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

usaha produktif yang prospektif sebagai sandaran utama hidupya, namun karena kesalahan manajemen, misalnya karena sesuatu kebutuhan yang mendesak dia terpaksa menggunakan modal usaha untuk menutup kebutuhan itu, sehingga usahanya menjadi tersendat bahkan terancam berhenti atau karena suatu becana, misalnya kebakaran, tanah longsor, banjir dan yang sejenis, sehingga usahanya menjadi sulit berkembang lagi karena barang dagangan atau komoditasnya hilang atau rusak, sementara dia harus tetap melunasi kwajibannya atas barag itu kepada pihak ketiga

Berkaca kepada pola pembiayaan modal ventura khususya pembiayaan pada masa penurunan, dimana bantuannya dapat berupa PMV menempatkan diri sebagai lembaga penjamin pijaman bagi PPU atau pijamannya baru akan dibayar apabila PPU telah mampu menutup semua biaya operasional. Dengan mengasumsikan bahwa orang-orang yang asset perniagaanya hilang akibat bencana alam sebagai bentuk usaha yag sedang mengalami penurunan (istilah PMV) atau sebagai garīm (istilah fiqh), sehingga kepada mereka kiranya dapat diberikan pinjaman pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan pertama-tama adalah untuk membayar kembali hutang atau kwajibannya pada pihak ketiga itu, hal ini sesuai dengan syarat-syarat alokasi kepadanya serta sifat kepemilikan dan penggunaan dana ZIS kepada golongan garim yaitu harus digunakan untuk menutup hutasgya. Sementara modal sendiri yang masih ada dapat digunakan untuk memutar kembali roda usaha produktifnya agar dapat dapat berkembang serta dapat membayar kembali pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan yang telah diterimanya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b) Ibn Sabil

Pengertian awal Ibn Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan ataupun orang yang hendak bepergian dalam rangka taat kepada Allah dan bukan untuk kepentingan maksiat, yang maksud dan tujuan itu tidak akan tercapai tanpa adanya bantuan.[24] Sedangkan menurut Ibn Qudamah, Ibn Sabil adalah kiasan untuk musafir yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah yang lain yang terhenti perjalananya.[25]

Dalam alam kemajuan informasi dan teknologi seperti saat ini kondisi Ibn Sabil sebagaimana pengertian awal tampaknya sudah sangat kecil kemungkinannya terjadi, kalaupun kondisi itu terjadi, maka sangat dimungkinkan karena orang yang bepergian tersebut dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah. Oleh karenanya pendekatan atau reinterpretasi yang kiranya dapat dilakukan adalah mengategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezki di kota-kota besar atau para pelajar dan mahasiswa yang sedang merantau mencari ilmu sebagai wujud atau pengertian ibn sabil pada kontek saat ini [26] Demikian pula Yusuf al-Qardawi setelah memperhatikann berbagai makna yang berkaitan dengan kata ibn sabil dalam berbagai ayat dalam al-qur'an serta beberapa pendapat ulama dalam masalah ini, menyatakan bahwa orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau amaliah yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[24] Wahbah Zuhailï, *al-Fiqh al-Islamï* .....hal. 1958

[25] Imām al-Alāmah Ibn Qudamah, *al-Mugnī*, ...hal 702

[26] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadarn dan Membangun Jaringan*, Edisi I, Cet. I (Jakarta: Putra Grafika, 2006) hal.206

dibutuhkan oleh negara Islam atau bepergian untuk kepentinagn yang akan kembali kepada masyarakat muslim dapat dikatakan sebagai Ibn Sabil[27].

Perluasan makna atau mengqiyaskan ibn sabil kepada dua entitas diatas kiranya telah dapat pula diterima dari sisi ilmu uṣul fiqh, karena telah tercukupinya syarat dan rukunya, khususnya dari persyaratan harus ada ilat hukumnya. Illat adalah salah satu ruku qiyas, bahkan merupakan unsur yang terpenting, dan diantara syarat illat adalah bahwa illat itu harus dalam bentuk sifat yang terukur, keadaannya jelas dan terbatas tidak bercampur dengan yang lainya.[28] Dalam hal ini sifat yang terukur itu adalah *'dalam perjalanan tidak untuk maksiat kepada Allah"*, dengan demikian, maka antara makna pertama (musafir) dan makna kedua (pelajar dan mahasiswa) telah terjadi persesuaian dalam illat hukum

Dengan adanya dua makna baru diatas dan dengan mengingat prinsip *revolving fund* dari al-Qarḍul Ḥasan, maka dalam kajian ini pengertian Ibn Sabil berarti pelajar atau mahasiswa yang sedang merantau mencari ilmu. Oleh karena itu bagi pelajar atau mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan membayar uang sekolah atau uang kuliah dan sejenisnya, yang dikarenakan adanya *musibah* yang menimpa keluarganya sehingga kiriman uang atau biaya pendidikan yang harusnya sudah diterima menjadi tersendat atau bahkan terhenti untuk beberapa lama, kiranya dapatlah kepada mereka diberikan bantuan pembiayaan sebagai dana talangan dari al-Qarḍul Ḥasan ini, yang kemudian bantuan

---

[27] Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*..... hal. 655

[28] H. Amir Syraifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal 175

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pembiayaan itu harus dikembalikan kepada bank manakala kiriman uang sekolah atau kuliah telah lancar kembali, baik dikembalikan secara angsuran ataupun sekaligus sesuai dengan akad yang dibuat antara pelajar atau mahasiswa dimaksud dengan bank.

2) Analisa Inovasi Pengembangan Varian Manfaat al-Qardhul Hasan

Berkaitan dengan upaya menginvestasikan dana ZIS kedalam usaha produktif, persolan yang pertama yang muncul adalah siapa yang akan mentasarufkannya. Dalam hal ini ada 3 kemungkinan, *pertama* si mustakhik sendiri, *kedua* si muzaki dan *ketiga* amil zakat. Kemungkinan pertama dan kedua masalahnya telah banyak dibahas dalam fiqh klasik,[29] sementara kemungkinan ketiga belum banyak dibahas dalam fiqh klasik, namun sejumlah ulama' kontemporer sudah menjadikanya bagian dari pembicaraan alternatif pendistribusian dana ZIS. Sejumlah ulama' yang menyetujui diataranya adalah Mustafa az-Zarqā, Yusuf al-Qardawi, Abdul Azīz al-Khiyat, sedangkan ulama yang tidak menyetujui diantaranya Wahbah az-Zuhailī, Abdullah Iwan dan Taqi Uśmāni.

Terlepas adanya perbedaan pendapat para ulama, kepentingan tulisan ini adalah mencari pola pendayagunaan dana ZIS yang paling ekonomis yang dapat diadopsi oleh praktek perbankan syari'ah, namun tetap dalam karidor

[29] Bila si mustakhik sendiri yang menginvestasikannya, jumhur ulama berpendapat bahwa seorang *mustskhik* dapat menginvestasikan dana ZIS yang telah di terimanya karena dana itu telah menjadi hak miliknya, sehingga ia bebas untuk menggunakannya. Sementara apabila si *muzaki* yang menginvestasikannya, pembahasan yang ada berkisar adakah di benarkan bila seorang muzaki menunda membayar ZIS (khususnya zakat), dimana dana yang seharusnya dibayarkan kepada mustakhik itu diinvestasikan terlebih dahulu. Dalam hal ini jumhur ulama' yakni, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus di segerakan dan tidak diperkenankan untuk menunda membayar zakat bila telah sampai kepada nisab dan haul.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

syari'ah atau mazhab tervalid. Dari sudut pandang ulama, Uśman Zuber sebagaimana dikutip oleh Arif Mufraini kemudian menvalidkan mazhab yang menyatakan :

"Memang pada hukum asalnya dana ZIS yang diterima oleh pemerintah atau yang mewakili (di Indinesia adalah BAZ), harus segera mendistribusikannya kepada para mustaḥik dan tidak dibenarkan untuk menundanya, akan tetapi jika ada kepentingan yang menundanya (ضرورة مصلحية) maka hal itu dapat dibenarkan, sedangkan untuk menginvestikanya, hal itu baru dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat dari kepentingan menginvestaskanya itu, seperti untuk mejamin adanya sumber-sumber keuangan yang relative permanen atau untuk mengurangi jumlah pengangguran dari pihak delapan golongan (asnaf)".[30]

Jika pendapat ini yang kemudian dijadikan acuan, maka persoalan selanjutnya adalah tinggal bagaimana agar dana ZIS yang telah diinvestasikan itu tidak habis karena adanya kerugian dari investasi tersebut. Hal ini mengharuskan amil yang menginvestasikan dana ZIS dimaksud harus betul-betul mempelajari prospek dan fisibilitas dari setiap bidang usaha yang menjadi objek investasi.

Dengan demikian, maka dalam operasionalnya, secara umum dapat penulis sampaikan bahwa pada tahap I bank syari'ah memberikan pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan dan wajib dikembalikan kepada bank syari'ah sesuai dengan akadnya. Tahap II

---

[30] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*.....hal.171

dana yang telah dikembalikan oleh penerimanya, baik seluruhnya atau setengahnya, dalam satu periode misalnya dalam 1 tahun, 2 tahunan dan lain-lain, bahkan jika memungkinkan dapat pula secara perseorangan, akan di kelola kembali oleh bank, dan akan dikeluarkan kembali dalam bentuk modal investasi misalnya, untuk membeli saham perusahaan atau digunakan untuk investasi atau keikutsertaan dalam reksa dana syari'ah atau pembelian surat-surat berharga dan lain-lain ivestasi kedalam usaha produktif, kemudian keuntungan atau deviden dari usaha tersebut dikelola kembali oleh bank syari'ah dan selanjutnya akan dikeluarkan kembali dalam bentuk jaminan atau bantuan dana perawatan kesehatan (ASKES al-Qarḍul Ḥasan) bagi para penerimanya yang dahulu, baik secara pribadi, jika investasinya dari pengembalian al-Qarḍul Ḥasan secara perseorangan atau ASKES al-Qarḍul Ḥasan dengan prinsip jaminan sosial seperti yang berlaku pada ASKES bagi PNS jika investasinya dari pengembalian al-Qardul Hasan secara berkelompok dalam suatu periode.[31]

Perbedaan kategori jaminan atau bantuan perawatan kesehatan diatas penulis pandang perlu, mengingat besarnya dana bantuan tentuya akan bervariasi bergantung kepada seberapa besar dana yang di investasikan dari masing-masing kategori. Pada tahap awal mungkin dana bantuan kesehatan ini

[31] Prinsip jaminan sosial dalam ASKES PNS menetapkan bahwa semua peserta wajib membayar premi sesuai dengan pangkat dan golongannya, serta semua peserta memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan akibat pembayaran premi dimaksud, namun jika seseorang tidak mengambil haknya, maka ia tidak dapat meminta kembali premi yang telah dibayarkan, sebab akan digunakann oleh perusahaan ASKES untuk membantu peserta yang lainnya. Demikian pula dalam ASKES al-qardhul Hasan semua calon penerima baik yang perseorangan ataupun berkelompok tidak diperkenankan menarik bagian dari investasinya jika tidak pernah menggunakan haknya, karena porsinya tersebut akan digunakan untuk membantu calon penerima yang lain yang lebih membutuhkan.

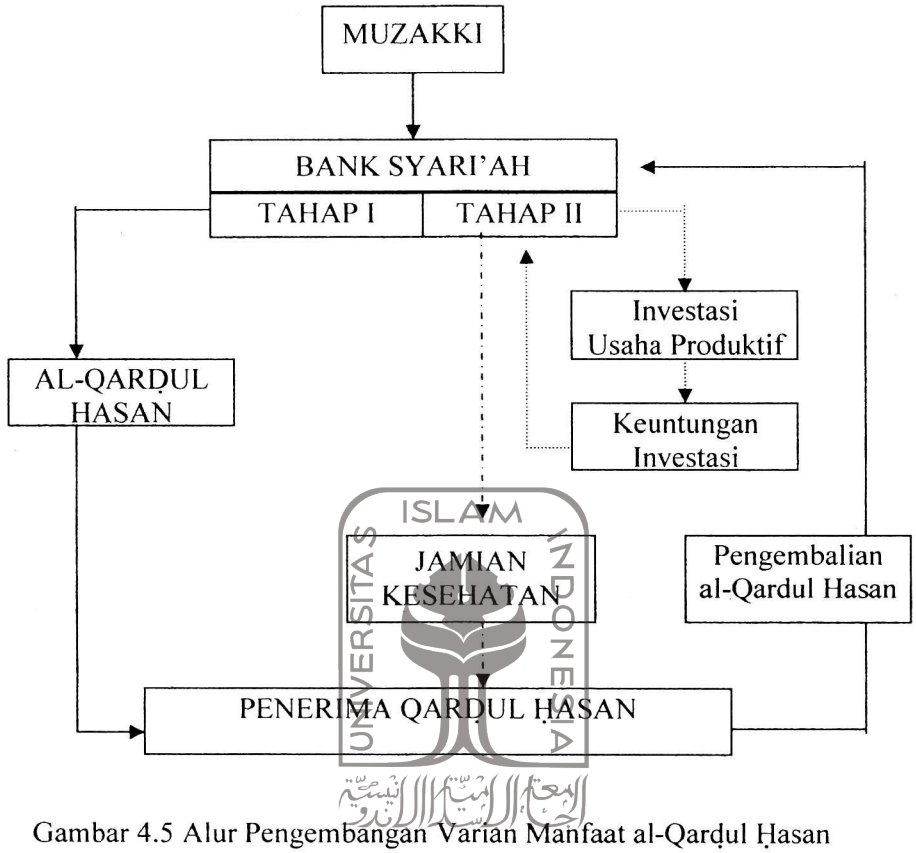
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masih sangat kecil, namun jika dari tahun ketahun investasinya meningkat tentu dana yang terkumpul juga akan semakin besar. Dengan demikian pengembangan varian manfaat ini akan memiliki beberapa nilai lebih, diataranya :

a. Mendorong penerima pembiayaan al-Qardhul Hasan mengembalikan pokok pembiayaan dengan tepat waktu, karena ada return yang akan diterima dibelakang hari jika mampu mengembalikan pokok pembiayaan, dan pada saat yang sama telah dapat mengurangi resiko terjadinya NPL
b. Memberikan rasa tenteram yang lebih kepada penerima pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan dan keluarganya karena ada jaminan dana jika sewaktu-waktu butuh dana untuk biaya perawatan kesehatan disamping rasa tentram karena usahanya yang dibiayai oleh al-Qarḍul Ḥasan dapat berkembang.
c. Mungkin investasi model ini adalah yang paling aman secara syar'i sebab jika investasi dilakukan langsung dari dana ZIS, maka jika terjadi kegagalan berarti amil telah menghilangkan haknya para mustaḥik, sehingga sebagian ulama' mengatakan amil wajib mengganti secara penuh harta zakat yang hilang atau rusak itu. Sementara dalam kasus ini para mustaḥik sesungguhnya telah memperoleh apa yang menjadi haknya, namun kemudian mereka ingin agar manfaat dari hak tadi menjadi lebih luas dengan memutar pengembalian pokok pinjaman untuk investasi usaha, sehingga jika gagal amil bebas atau berbagi resiko dengan mustaḥik

Alur pengembangan varian manfaat al-Qarḍul Ḥasan tersebut dapat diilustrsikan dalam gambar berikut ini :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Gambar 4.5 Alur Pengembangan Varian Manfaat al-Qardul Hasan

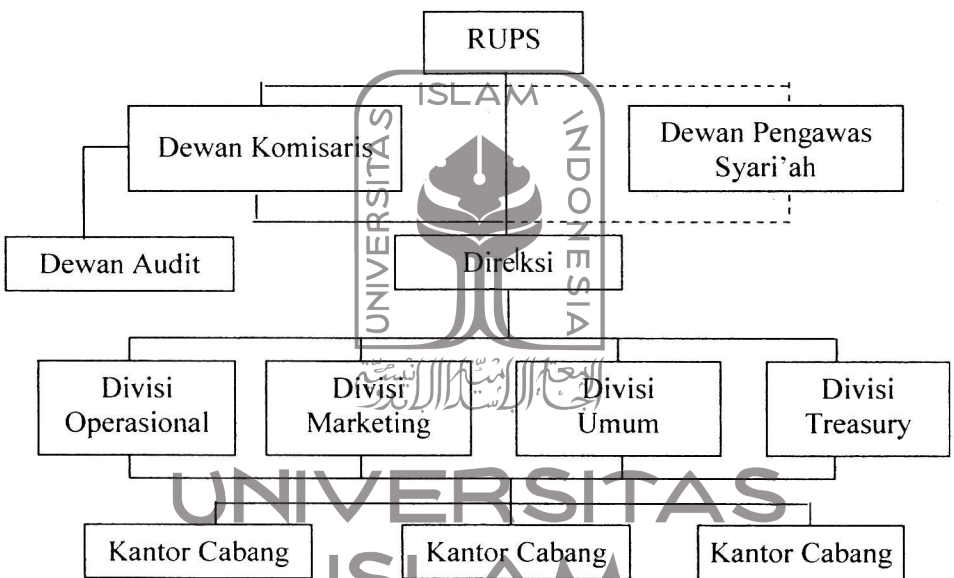
Sumber : Diolah berdasarkan Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3) Analisa Pelaksanaan Pengawasan

Bank-bank syari'ah seharusnya tidak perlu malu untuk mengambil ide dari keunggulan modal ventura yang berupa pendampingan secara intensif kepada perusahaan pasangan usahaya, untuk memastikan dan mejamin agar usaha PPUnya berhasil, yang secara berkala memberikan saran dan bimbingan bahkan sampai kepada membantu di bidang pemasaran, sehingga seperti dikatakan oleh Gladstone bahwa sesungguhnya PMV adalah rekan bisnisnya PPU, dan tugas-tugas dimaksud biasanya dilakukan oleh petugas khusus yaitu

Account Officer. Untuk itu agar pegelolaan al-Qarḍul Ḥasan oleh bank syari'ah dapat dilakukan secara propesional, maka langkah yang memungkinkan adalah meningkatkan daya guna unit-unit terkait dalam organisasi bank syari'ah. Struktur organisasi bank syari'ah secara sederhana (minimalis) mencakup komponen-komponen sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Gambar 4.5 Organisasi bank umum syari'ah

Sumber : Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah

Satu diantara divisi-divisi di atas yang memungkinkan untuk dioptimalkan untuk maksud diatas adalah divisi marketing, fungsi divisi marketing adalah untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan, di samping itu berfungsi pula sebagai

suprvisi dan pekerjaan lain yang sesuai dengan ketentuan manajemen. Sehingga dalam operasionalnya divisi marketing terdiri dari beberapa bagian diantaranya, *Account Officer*, Mobilisasi Dana, Bagian Support Pembiayaan, Bagian Adminstrasi Pembiayaan dan Bagian Pengawasan Pembiayaan.[32]

Sebagaimana telah di bahas diawal, bahwa diantara penyebab terjadinya NPL al-Qarḍul Ḥasan dalam anlisa Firdaus Furywardhana adalah tidak ada petugas khusus untuk pelayanan produk al-Qardhul Hasan karena bank masih menganggap produk al-Qarḍul Ḥasan sebagai produk sampingan, sehingga selama ini tugas-tugas yang berkaitan dengan pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan dilakukan oleh petugas marketing sebagai tugas tambahan, akibatnya hasil atau output dari produk al-Qarḍul Ḥasan tidak bagus. Sehingga untuk mendukung sekaligus meningkatkan performa al-Qarḍul Ḥasan sebaiknya bank-bank syariah menugaskan beberapa orang bahkan membentuk divisi khusus untuk itu, terlebih mengingat al-Qardhul Hasan adalah produk yang secara signifikan membedakanya dengan bank konvensional. Untuk keperluan itulah kiranya bank syari'ah harus melakukan langkah-langkah kongkrit diantaranya.

Bahwa dari divisi marketing ini bank syari'ah dapat membentuk satu tim kecil sebagai turunannya lengkap dengan bagian-bagianya akan tetapi tidak keluar dari divisi marketing bank syari'ah secara umum, yang secara khusus bertugas menangani pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan apalagi dengan varian tambahan manfaat seperti penulis paparkan. Bank syari'ah dapat mengambil

---

[32] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2002), hal. 130

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kebijakan tertentu berkenaan dengan jumlah personal yang akan menangani al-Qarḍul Ḥasan untuk tugas-tugas diataranya:

a) *Funding Officer* al-Qarḍul Ḥasan (FO) bertugas memobilisasi dana ZIS dari masyarakat sebagai sumber utama dana al-Qarḍul Ḥasan, dengan meyeberluaskan fungsi bank syari'ah sebagai amil zakat lewat berbagai media, pengajian-pegajian, khutbah jum'at dan lain-lain. Funding Officer ini juga bertugas melihat, menganalisa dan melakukan investaasi dana dari pengembalian al-Qarḍul Ḥasan pada usaha-usaha produktif. selanjutnya kedepan peran FO ini hendakya senatiasa dioptimalkan untuk menutup kecilnya dana yang tersedia untuk produk al-Qarḍul Ḥasan
b) *Account Officer* al-Qarḍul Ḥasan (A/O) bertugas memproses calon debitur sehingga mejadi debitur sekaligus membinanya agar memenuhi kesaggupanya terutama dalam pembayaran kembali pijamannya juga meyelesaikan permasalahan debitur yang mungkin terjadi
c) Bagian *Support* Pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan Bagian ini dapat diperluas tugasnya dari sekedar tugas mengadakan penilaian pemohon pembiayaan sehingga memenuhi kriteria A/O khususnya dari sisi legalitas, kepada tugas-tugas supporting yang bersifat pelatihan-pelatihan yang bersifat motivasi dan peningkatan kemampuan wirausaha kepada penerima al-Qarḍul Ḥasan bahkan jika memungkinkan supportingnya dapat berupa bantuan manajerial sampai kepada pemasaran produk sebagaimana dalam Modal Ventura.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d) Bagian Adminstrasi Pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan bertaggungjawab terhadap semua administrsi penerima al-Qarḍul Ḥasan khusunya mulai saat pencairan, pelunasan hingga data-data dan syarat yang diperlukan untuk penerimaan bantuan perawatan kesehatan sebagai bentuk varia manfaat al-Qarḍul Ḥasan yang telah penulis paparkan.

e) Bagian Pengawasan Pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan bertugas memantau pembiayaan agar pembiayaan yang telah diterimakan benar-benar berfugsi da berdaya gua sesuai dengan tujuan, diantara tugas bidang ini membuat surat peringatan dan penagihan kepada debitur.

B. Lembaga Pengelola al-Qarḍul Ḥasan

Saat ini yang menjadi trend dari *Islamization process* yang di kembangkan oleh para pemikir ekonomi Islam komtemporer adalah:

1. Mengganti ekonomi sistem bunga dengan ekonomi sistem bagi hasil (*free interest*)
2. Mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian (fungsi *redistribution income*)[33]

Untuk menjembatani dua target sasaran diatas, sejumlah pemikiran inovatif mengenai *intermediary system* yang akan mengelola dana investasi dan dana zakat telah dikembangkan oleh para pemikir ekonomi Islam dewasa ini, salah satu dari intermediary sistem itu adalah bank syari'ah. Sehingga Bank syari'ah saat ini dapat dikatakan sebagai representasi juga etalase dari kebangkitan dari

[33] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*.....hal. 157

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

teori ekonomi Islam secara makro, yang diyakini oleh berbagai kalangan akan segera dan mampu untuk menggantikan dua sistem ekonomi dunia saat ini, kapitalisme dan sosialisme.

Pada sistem operasional bank syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif untuk mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Sehingga bank syari'ah akan mampu mendorong pemerataan pendapatan khususnya bagi pihak-pihak yang mengalami defisit, karena bank syari'ah tidak hanya mengunpulkan dana dari pihak ketiga yang surplus namun juga dapat mengumpulkan dana ZIS dari pihak yang surplus untuk disalurkan lewat al-Qarḍul Ḥasan, sehingga dengan itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi atau pendapatan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Itulah misi yang di emban oleh bank syari'ah, sehingga berangkat dari pandangan diatas penulis berketetapan bahwa sebaiknyalah bila al-Qarḍul Ḥasan itu tetap di kelola oleh bank syari'ah sendiri sebagaimana ditetapkan dalam KDPP, mengingat *pertama* : al-Qardul Hasan adalah ciri khas atau idenitas bank syariah apalagi dalam menghadapi persaingan dunia perbankan yang semakin sengit, dimana dalam kondisi persiangan perbedaan-perbedaan yang spesfik dari suatu produk akan dapat menjadi nilai keunggulan

kompetitifnya serta dapat meningkatkan citra bank bersagkutan,[34] *kedua* ; munculya bank syari'ah yang sekaligus berfungsi sebagai amil zakat disamping BAZ dan LAZ yang sudah ada sesungguhnya justru akan memberikan kemudahan bagi muzakki untuk membayar zakat karena tersedia banyak pilihan untuk menitipkan dana ZISnya, bahkan trend saat ini banyak LAZ dan BAZ yang menggunakan bank untuk menghimpun dana ZIS dari masyarakat

Hanya dalam kondisi tertentu, misalnya bank syari'ah masih kekuragan tenaga propesioal untuk mendukug suatu tugas tertentu dari al-Qarḍul Ḥasan, mengingat sebagimana dikatakan oleh Zainal Arifin[35] bahwa bank syari'ah masih tergolong barang yang baru, sehingga sebagian manajemenya masih mengadopsi pola manajemen bank konvensional yang di syari'ahkan, maka bank syari'ah dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk bagian-bagian tertentu dari keseluruhan proses pembeian pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan diatas. Misalnya bekerjasama dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengadakan pelatihan-pelatihan wirausaha atau untuk memberikan bantuan manajerial kepada penerima al-Qarḍul Ḥasan Sehingga dengan skim ini dapat terjadi calon penerima al-Qarḍul Ḥasan menerima bantuan dari dua pihak, dananya dari bank syari'ah sementara bantuan manajerial berasal dari BMT atau LSM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[34] Pada akhir-akhir ini bank-bank umum giat melaksanakan program social dengan istilah Coorporate Social Responsibility (CSR), program ini sekilas Nampak kesamaya dengan al-Qardhul Hasan misalya memberikan bantua modal usaha, memberikan bea siswa dan lain-lainnya, namun pada tahap akhir akan sangat berbeda dimana ada kemugkinan pengembalian dari al-Qardhul Hasan (QH) bisa lebih besar karena ditambah dengan zakat dari usaha yang dibiayai oleh al-Qardhul Hasan, disamping pahala ibadah karena dengan mengembalikan pembiayaan al-Qardhul Hasan sesungguhnya ia telah ikut berpartisipasi mejadikan penerima al-Qardhul Hasan menjadi muzaki pada tahun berikutnya

[35] Lihat Zainul Arifin, Memahami Bank Syari'ah, 2000

Namun jika tugas-tugas untuk bidang-bidang diatas telah mampu di cover oleh bank syari'ah sendiri hendaklah dilakukan sendiri, hal ini akan membawa pengaruh positip terhadap bank syariah khususnya apresiasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syari'ah. Jika manajemen al-Qarḍul Ḥasan di kelola oleh lembaga diluar manajemen bank syariah yang bersangkutan tentu imaje dan tudingan masyarakat bahwa bank syari'ah adalah bank konvensional dengan label syari'ah akan tetap ada, terbukti bahwa bank syari'ah "nampak" hanya paiwai dalam menghimpun dana dan mengalokasikannya kembali dalam akad-akad tijaroh yang berujung pada perolehan keuntungan, meskipun hal ini tidak salah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk meningkatkan performa dan memaksimalkan manfaat serta fungsi al-Qarḍul Ḥasan dapat dilakukan dengan menambahkan atau meningkatkan keunggulan kompetitifnya, dan hal itu dapat di tempuh melalui 3 cara :

   a. Memperluas pangsa pasar al-Qarḍul Ḥasan kepada yang memungkinkan dari asnaf delapan selain fakir, miskin dan sabilillah, yaitu Garim dan Ibn Sabil dengan terlebih dahulu melakukan re-intepretasi kepada keduanya. Pada kontek sekarang yang termasuk garim adalah orang yang kena musibah/bencana alam sehingga barang/komoditas usahanya hilang atau rusak, sementara ia memiliki kwajiban kepada pihak ketiga atas barang itu, maka kepada mereka diberikan bantuan al-Qarḍul Ḥasan untuk menutup kwajibannya kepada pihak ketiga, sedangkan modal sendiri yang masih ada untuk memutar roda usaha. Masuk kedalam Ibn Sabil adalah para pelajar dan mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar uang pendidikan karena hal-hal diluar perhitungan yang menimpa pengampu beaya pendidikannya, maka kepada mereka juga dapat diberikan pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan sebagai talangan dana pendidikan

   b. Inovasi pengembangan varian manfaat al-Qarḍul Ḥasan, yaitu dengan menjadikan pengembalian al-Qarḍul Ḥasan untuk modal investasi pada

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

usaha-usaha produktif, kemudian dividen atau keuntungan dari investasi tersebut dikembalikan kepada penerima al-Qarḍul Ḥasan dalam bentuk jaminan atau bantuan beaya perawatan kesehatan, yang di istilahkan dengan ASKES al-Qarḍul Ḥasan dengan prinsip jaminan sosial dimana bagi yang tidak menggunakan dana bantuan tersebut tidak dapat menarik preminya akan tetapi akan di manfaatkan oleh anggota yang lain yang lebih membutuhkan, sehingga bantuan al-Qarḍul Ḥasan dapat dirasakan secara psykologis

c. Menjadikan pengawasan sebagai bagian tak terpisahkan dari pelayanan pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan. Untuk keperluan ini bank syari'ah pertama-tama harus mengelola al-Qarḍul Ḥasan secara profesional dengan cara mengoptimalkan divisi marketing, baik dengan membentuk tim khusus pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan atau menugaskan beberapa orang secara khusus untuk tugas dimaksud. Kedua melakukan pelatihan wiarausaha, dengan adanya pelatihan-pelatihan bagi penerima al-Qardhul Hasan baik yang bersifat motivasi wirausaha atau training ketrampilan tertentu, kemudian pendampingan bahkan bantuan manajerial usaha dan pemasaran serta dengan pengawasan yang intensif pada akhirnya diharapkan bantuan al-Qardhul Hasan mampu mengangkat derajat kehidupan penerimanya dan bank akan terbebas dari penyakit NPL.

2. Untuk pengelolaan produk al-Qarḍul Ḥasan akan lebih baik jika dilakukan sendiri oleh bank syari'ah yang bersangkutan, disamping karena al-Qarḍul

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ḥasan adalah ciri khas bank syari'ah yang membedakannya dari bank konvensional berikut juga karena memenuhi aturan KDPP bank syari'ah, hal itu juga akan meningkat citranya karena tidak hanya sibuk mendulang keuntungan lewat bermacam-macam produk pembiayaan akan tetapi juga piawai dan berkomitmen penuh terhadap kegiatan sosial, dan secara tidak langsung juga akan menghilangkan imej bahwa bank syari'ah adalah bank konvensional dengan label syari'ah.

B. Saran-saran

Untuk menjadi perhatian bagi bank-bank syari'ah, bahwa pada akhir-akhir ini bank-bank umum giat melaksanakan program social dengan istilah *Coorporate Social Responsibility* (CSR), program ini sekilas nampak kesamaanya dengan al-Qardhul Hasan misalya memberikan bantuan modal usaha, memberikan bea siswa dan lain-lainnya, namun pada tahap akhir akan sangat berbeda dimana ada kemugkinan pengembalian dari al-Qarḍul Ḥasan bisa lebih besar karena ditambah dengan zakat dari usaha yang dibiayai oleh al-Qarḍul Ḥasan disamping pahala ibadah karena dengan mengembalikan pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan sesungguhnya ia telah ikut berpartisipasi mejadikan penerima al-Qarḍul Ḥasan menjadi muzaki pada tahun berikutnya, dengan demikian bank syari'ah hendaknya tetap berkomitmen untuk mengelola dan mengembangkan produk al-Qarḍul Ḥasan dari waktu kewaktu sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Anshori, Abdul Ghafur,2006, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, Cet. Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Antonio, M. Syafi'i, 1999. *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Cet Pertama. Yogyakarta: Tazkia Institut-BI.

----------, 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakart : Gema Insani Press.

Arifin, Zainul, 2000. *Memahami Bank Syari'ah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Cet. Kedua. Jakarta: Alva-Beta.

Azizy, A. Qodri, 2004, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Cet. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Asqalānī, Ibn Ḥajar al-, Tanpa Tahun, *Bulug al-Marām*, "7.Kitāb al-Buyū", "5.Bāb. as-Salam, wa al-Qard, wa ar-Rahn" Ḥadiŝ nomor. 8, Beirut: Maktabah Tijārah al-Kubra.

Atmadjaja, "Modal Ventura : Salah Satu Bentuk Permodalan Usaha Kecil dan Menengah" dalam *Jurnal Bina Ekonomi Universitas Parahyangan*, tahun VI Mei 1999

Badrudin Dkk, 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: STIE YKPN.

Ba'ly, Abdul al-Hamid Mahmud al-, 2005. *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Terjemahan oleh Muhammad Abqory Abdullah Karim, Cet.pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Bukhārī, Imām Abī Abdullah Muhammad ibn Ismā'il al-, Tanpa Tahun, *Ṣahīh Bukhāri*, "Kitāb asy-Syurūd", "Bāb asy-Syurūd fī al-Qarḍ", Semarang: Thaha Putra.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Chapra, M. Umar, 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terjemahan Oleh Nurhadi Ikhsan, Cet. PertamaI. Surabaya: Risalah Gusti.

Departemen Agama RI, 1995. *al-Qur'an dan Terjemahya*, Semarang: Thaha Putra.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2002. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Pengujian Laporan Keuangan Bank Syari'ah*, Cet. Pertama. Jakarta : PSAK.

Furywardhana, Firdaus, 2006. "Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan, Study Kasus BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta" Tesis Magistes Studi Islam , Yogyakarta: UII.

Hakim, Abdul Hamid, Tanpa Tahun. *Mabādi Al-Awwaliyah* , Jakarta: Sa'adiyah Putra.

Gladstone, David, 1988. *Ventura Capital Handbook New and Revised*, New Jersey: Prentice Hall.

http://www.baitulmaal.net/modules.php

http://www.bank-syariah-belajar-yuk.blogspot.com/2007/07/produk pembiayaan

http://www.beritabumi.or.id/artikel3.php?idartikel=173 - 30k

http://www. Jatim.go.id/news.php?id+10411

http//www.kompas.com/kompas-cetak/0308/07/Perbankan

http;//www.mail-archive.com/jamaah@arroyyan.com/msg03249.html - 15k,

http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2006/052006/19/99kolom

http://www.republika.co.id/.../cetak_detail.asp

http//www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/08/01/brk

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Institut Banking Indonesia, Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, 2002. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan dan IBI.

Jazirī, Abdur Rahman al-, Tanpa Tahun. *al-Fiqh Alā al-Mażāhib al-Arba'ah*, Juz I. Kairo : Dār al-Ḥadīs.

Kadir, Muhammad Abdul dan Murniati Rilda, 2004. *Segi Hukum Lembaga Pembiayaan di Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Karim, Adiwarman A, 2005. *Islamic banking, Fiqh and Financia Analysis*, 3th edition, Cet.pertama. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Kotler, Philip dan Gary Armstrong, 1997. *Dasar-Dasar Pemasaran*, Terjemahan Alexander Sindro, Jilid I, Jakarta: Prenhallindo.

Kuncoro, Mudrajat dan Suhardjo, 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Cet Pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Mannan, M. Abdul, 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Mas'ud, Ridwan dan Muhammad, 2005. *Zakat dan Kemiskinan : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* Cet. Ketiga. Yogyakarta: UII Press.

Moeloeng, Lexy J,2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Edisi Revisi, Cet.Kedua Puluh Tiga. Bandung: Remaja Rosdakarya,

Mufraini, M. Arif, 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadarn dan Membangun Jaringan*, Edisi I, Cet. Pertama. Jakarta: Putra Grafika.

Muhammad, .2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* Cet. Pertama. Yogyakarta : UII Press.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---------- 2002, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.

---------- (Ed), *2003. Bank Syari'ah, Analisis Kelemahan dan Kekuatan,* Cet Kedua. Yogyakarta : Ekonosia, 2003

_____, 2005, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Cet. Kedua. Yogyakarta: Ekonosia

Muslehuddin, Ahmad, 1990. *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta.

Qardawi, Yusuf al-, 2007. *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Falsafah Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis*, Terjemahan oleh Salman Harun Dkk, Cet.X. Bogor: Pustaka Citra Antar Nusa.

Qudāmah, Imām al-Alāmah Ibn, Tanpa Tahun. *al-Mugnī*, Juz II. Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah

Quzwaini, Abī Abdullah Muhammad ibn Yazīd al-, 1998. *Sunan Ibnu Mājah,* "19 Kitāb as-Ṣadaqāt". "Bab. al-Qarḍ", Juz. II, Cet. Pertama, Kairo : Dār al-Ḥadīṡ.

Rosly, Saiful Azhar, 2005. *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Market*, Malaysia: Dinamas Pubishing.

Rumah Zakat Indonesia, "Laporan Penerimaan dan Penyaluran Januari- Desember 2005", dalam *Buletin Rumah Lentera Hangatkan Rasa Nyalakan Cita*, Edisi III/Mei 2006

Sābiq, Muhammad Sayid. 1995 *Fiqh Sunnah*, Juz. III, Kairo: Dār al-Fatḥ Li I'lām al-Arabī.

Soeratno dan Lincolin Arsyad, 1988. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta-LMP2M AMP YKPN.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sumanto, 2002, *Pembahasan Terpadu Statistika dan Nmetodologi Riset, Buku II,* Cetakan Pertama. Yogyakarta : Andi Offset.

Supriyanto, H."Manajemen Zakat" Makalah workshop Manajemen Pengelolaan Zakat tanggal 22 Mei 2006, di Asrama Haji Yogyakarta

Susilo, Y Sri Dkk. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. Pertama. Jakarta: Salemba Empat.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* Jiilid II (Jakarta:Logos Wacana ilmu, 1997)

Syaukani, Muhammad ibn Alī ibn Muhammad al-, Tanpa Tahun. *Nailul Author*, Juz IV Kairo: Maktabah Dār al-Turās.

Taswan, 2006. *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik dan Aplikasi*, Cet. Kedua Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Teguh, Muhammad, 1999. *Metode Penelitian Ekonomi*, Cetakan Pertama. Jakarta : Raja Grafindo.

Zuhailī, Wahbah, 2004. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adilatuhu*, Juz. 5. Cet. 4 Kairo Dār Al- Fikr

Yusuf, Choirul Fuad, 1997. "Etika Bisnis Islam, Sebuah prospektif Lingkungan Global". Dalam *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, Ulumul Qur'an* (3):14-16. Jakarta

Zadjuli, Suroso, 2006. "Evaluasi dan Potensi Pengembangan Ekonomi Syari'ah di Indonesia", *Makalah* di Sampaikan Pada Seminar Evaluasi Ekonomi Syari'ah 2005 dan Outlook 2006, oleh Centre of Islamics and Business Resourcess Development, Universitas Airlangga, Surabaya, 19 Desember 2005

Zamakhsyari, as-, Tanpa Tahun. *Tafsir al-Kassaf*, Juz. II. Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

1. Gambar 1.1 Perubahan Fungsi Akad 16

2. Gambar 2.1 Skema Pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan 38

3. Gambar 2.2 Alur Pembiayaan Modal Ventura 50

4. Gambar 3.1 Perkembangan al-Qarḍul Ḥasan 59

5. Gambar 3.2 Penggunaan Pembiayaann al-Qarḍul Ḥasan 62

6. Gambar 3.3 Alur Pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan 68

7. Gambar 3. 4 Jumlah Pembiayaan al-Qarḍul Ḥasan BNI Syari'ah 69

8. Gambar 3.5 Tunggakan al-Qarḍul Ḥasan BNI syari'ah 70

9. Gambar 4.1 Perbandingan al-Qarḍul Ḥasan dengan Hibah 76

10. Tabel 4.2 Perbandingan Perolehan ZIS 77

11. Gambar 4.3 Daur Hidup Produk Bank 81

12. Tabel 4.4 Matrik Analisa SWOT 84

13. Gambar 4.5 Alur Pengembangan Varian Manfaat al-Qarḍul Ḥasan 102

14. Gambar 4.6 Organisasi Bank Umum Syari'ah 103

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Karya Imiyah : Dār as-Salam dan Dār al-Ḥarbi Serta Aplikasinya Dalam Tata Politik Negara Modern (Skripsi, 1995)

Menggenggam Dunia Dengan Amal Shaleh (Jurnal Ilmiyah Ḥukama, No. 1. 2007)

Monopoli Oleh Negara dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, (Jurnal Ilmiyah Ḥukama, No. 2. 2007)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA